

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2020**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi, informasi dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Painan, Februari 2020



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
II. Sekilas Tentang SPIP	4
A. Pengertian	4
B. Tujuan SPIP	4
C. Unsur-unsur SPIP	4
1. Lingkungan Pengendalian	5
2. Penilaian Resiko	5
3. Kegiatan Pengendalian	6
4. Informasi dan Komunikasi	6
5. Pemantauan Berkelanjutan	7
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)....	7
III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	8
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang baik	8
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini	8
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	10
IV. Risiko dan Kegiatan Pengendalian	11
A. Pernyataan Tujuan	12
B. Risiko-risiko	13
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang	13
D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	13
V. Informasi dan Komunikasi	13
VI. Pemantauan dan Evaluasi	13
VII. Penutup	14
Lampiran	

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan Pengendalian Intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP), sebagai acuan bagi penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 merupakan pondasi Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pasal 12 disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau

kinerja, pemeriksaan melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam pengendalian resiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan, visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/300/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Power Asesor, Asesor, Admin Asesor dan Counter Part Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian diharapkan dalam Tahun 2020

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan

pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa Sistem Pengendalian Intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan Sistem Pengendalian Intern yang ada, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi

sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya Sistem Pengendalian Intern secara efektif dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berperan efektif;
dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Sekda, Staf Ahli Bupati dan 11 Bagian) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian Setda, Staf Ahli Bupati dan Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kode etik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah disusun, tetapi kode etik untuk Kabupaten Pesisir Selatan sedang proses penyusunan.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai

	pembinaan sumber daya manusia	
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat Daerah dan Inspektorat Provinsi

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2019, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan Akuntabel.
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan Administrasi Pemerintahan.
3. Mewujudkan Kehidupan beragama dan interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan dengan mengembangkan nilai budaya ABS-SBK

4. Meningkatkan wawasan kebangsaan, wawasan politik dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan terdapat pada lampiran 3

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah terdapat pada lampiran.

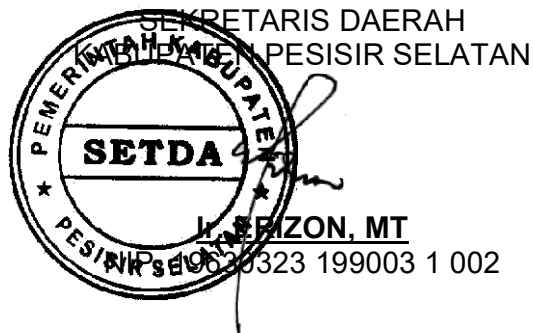
VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan terdapat pada lampiran.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan



LAMPIRAN 1

RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kode etik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah disusun, tetapi kode etik untuk Kabupaten Pesisir Selatan sedang proses penyusunan.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat Daerah dan Inspektorat Provinsi

Identifikasi Tujuan Strategis

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan aparatur yang efektif dan efisien	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penyusunan LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan
				Monev E Sakip Kabupaten Pesisir Selatan
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Alat Tulis Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Niaga Bahan Bakar Bersubsidi
				Pengembangan Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
				Penataan dan Penguatan Kelembagaan
				Penataan Jabatan Perangkat Daerah
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
				Penyediaan jasa kebersihan kantor
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
				Penyediaan makanan dan minuman
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
				Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
				Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas (KDH)
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (KDH)
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (KDH)
				Pendataan dan Penataan dokumen/Arsip Daerah (Unit Arsip Ke Depo Arsip Daerah)
				Peningkatan manajemen aset/barang daerah
				Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan
				Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
				Penyusunan Prosedur Kegiatan
				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
				Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan
				Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
				Pengendalian dan Koordinasi Program Pembangunan Daerah
				Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati
				Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan
				Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
				Rapat Koordinasi Penyeleggaraan Pemerintah Daerah
				Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan
				Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
				Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

				Penilaian Kompetensi Camat dan Perangkatnya
				Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami
				Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
				Fasilitasi Kerjasama Rantau
				Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Peptisida
				Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan
				Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah
				Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan
			2. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat
				Peningkatan manajemen pelayanan Publik
			3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
				Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Nagari
				Penyelesaian Sengketa Hukum
				Publikasi Peraturan Perundang-undangan
				Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
				Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah
				Publikasi dan Promosi Daerah
				Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
				Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
				Fasilitasi Lelang dan Klarifikasi PBJ
				Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa
2	Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatnya Peran serta Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Keagamaan dan Sosial kemasyarakatan	Safari Keagamaan Pemerintah Daerah
				Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ
				Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan
				Pembinaan Didikan Shubuh Terjati
				Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan
				Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
				Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran
				Peningkatan Imtaq bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam
				Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
				Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
				Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
				Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Pesisir Selatan
				Fasilitasi Pelaksanaan dan Pelaporan RANHAM
				Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
				Pemasyarakatan Olahraga aparat
				Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
				pencegahan tindak kriminal
3.	Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang	Meningkatnya Peran serta aparat Pemerintah dalam bidang perlindungan masyarakat	Meningkatnya Peran Struktur Sosial dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat terlarang	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasan dengan tujuan/sasaran strategis	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terukurnya IKM dengan nilai yang lebih baik	Selaras	
2	Peningkatan manajemen pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan publik	Selaras	
3	Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tersedianya produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah/Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesesuaian	Selaras	
4	Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Nagari	Membantu menvalidasi, evaluasi dan klarifikasi produk hukum terutama peraturan nagari dan keputusan bupati yang dilahirkan oleh OPD dan Nagari	Selaras	
5	Penyelesaian Sengketa Hukum	Untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan perkara, baik yang terkait dengan aset Pemerintah Daerah dan lain-lain	Selaras	
6	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah Tahun 2018	Selaras	
7	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Menjalin koordinasi dan guna mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Perusahaan Pers dan Wartawan	Selaras	
8	Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Mendokumentasikan acara kegiatan pimpinan pemerintah daerah, sesuai moto " Kerjaku Membangun Pesisir Selatan" sekaligus sebagai "Rapor" Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Selaras	
9	Publikasi dan Promosi Daerah	Menyediakan media informasi melalui publikasi dan promosi daerah pada media cetak, eletronik dan siber guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi pembangunan, sesuai moto " Kerjaku Membangun Pesisir Selatan" sekaligus sebagai "Rapor" Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Selaras	
10	Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan baik.	Selaras	
11	Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Terlaksananya proses pengadaan barang / jasa secara elektronik	Selaras	
12	Fasilitasi Lelang dan Klarifikasi PBJ	Terfasilitasinya pelaksanaan lelang dan klarifikasi pengadaan barang dan jasa	Selaras	
13	Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Selaras	
14	Penyusunan LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Selaras	
15	Monev E Sakip Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya Laporan penilaian kinerja SKPD	Selaras	
16	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat daerah	Selaras	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat Kedinasan	Selaras	

18	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Selaras	
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Selaras	
20	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Selaras	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Selaras	
22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Niaga Bahan Bakar Bersubsidi	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Energi Bersubsidi	Selaras	
23	Pengembangan Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Selaras	
24	Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya Kualitas Penguatan Kelembagaan	Selaras	
25	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Selaras	
26	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Selaras	
27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD Setda yang baik	Selaras	
28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Selaras	
29	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Selaras	
30	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Selaras	
31	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Selaras	
32	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Dalam	Selaras	
33	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Sekretariat Daerah	Selaras	
34	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Tersedianya jasa tenaga kerja Non PNS	Selaras	
35	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan	Selaras	
36	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Selaras	
37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	Selaras	
38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Selaras	
39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Selaras	
40	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Selaras	
41	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Selaras	
42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan	Selaras	
43	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas (KDH)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan rumah dinas (KDH)	Selaras	
44	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (KDH)	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (KDH)	Selaras	
45	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (KDH)	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (KDH)	Selaras	
46	Pendataan dan Penataan dokumen/Arsip Daerah (Unit Arsip Ke Depo Arsip Daerah)	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip lingkup Sekretariat Daerah	Selaras	
47	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersedianya Dokumen Aset/Barang Sekretariat Daerah	Selaras	
48	Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan	Tersusunnya Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan	Selaras	
49	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan pembangunan daerah	Selaras	
50	Penyusunan Prosedur Kegiatan	Tersusunnya dokumen prosedur kegiatan	Selaras	

51	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya laporan DUK, Bezzeting, Kenaikan Pangkat, Berkala dll	Selaras	
52	Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan	Terlaksananya tugas-tugas Keprotokolan yang akan dihadiri oleh Pimpinan Pemerintah Daerah	Selaras	
53	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	Terlaksananya fungsi koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan	Selaras	
54	Pengendalian dan Koordinasi Program Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian program/kegiatan pembangunan daerah	Selaras	
55	Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati	Terlananya Fungsi Staf Ahli Bupati secara Optimal	Selaras	
56	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Umum, Organisasi, dan Keuangan	Selaras	
57	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum	Selaras	
58	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara / Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Selaras	
59	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Selaras	
60	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Selaras	
61	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan kewilayahan	Selaras	
62	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Selaras	
63	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	Terfasilitasinya kerjasama antar daerah	Selaras	
64	Penilaian Kompetensi Camat dan Perangkatnya	Terlaksananya Penilaian Kompetensi Camat	Selaras	
65	Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami	Tersusunya dokumen penamaan rupa bumi dan unsur alami	Selaras	
66	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan	Terfasilitasinya penegasan batas daerah dan kecamatan	Selaras	
67	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Selaras	
68	Fasilitasi Kerjasama Rantau	Terbentuknya Nagari binaan Perantau	Selaras	
69	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Peptisida	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan pestisida	Selaras	
70	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan	Terlaksananya koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	Selaras	
71	Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Terlaksananya Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Selaras	
72	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Selaras	
73	Safari Keagamaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Safari Ramadhan oleh Tim Silaturahmi Pemda	Selaras	
74	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	Selaras	
75	Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Keberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji	Selaras	
76	Pembinaan Didikan Shubuh Tergiat	Terbinanya lembaga didikan subuh	Selaras	
77	Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan	Terlaksananya koordinasi dan kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Selaras	
78	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Terkelolanya Pemberian Hibah Bansos	Selaras	
79	Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Terbinanya Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Selaras	
80	Peningkatan Imtaq bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam	Terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Selaras	
81	Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya monitoring Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Selaras	

82	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Menurunnya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika	Selaras	
83	Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Selaras	
84	Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya operasionalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial	Selaras	
85	Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Saber Pungli	Selaras	
86	Fasilitasi Pelaksanaan dan Pelaporan RANHAM	Tersusunnya Laporan RANHAM	Selaras	
87	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Selaras	
88	Pemasyarakatan Olahraga aparat	Terlaksananya kegiatan olahraga bagi aparat	Selaras	
89	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Selaras	
90	Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Selaras	

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan atas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran di atasnya (strategis)

IDENTIFIKASI RISIKO

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1		2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terukurnya IKM dengan nilai yang lebih baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih bernilai kurang baik	Kepala Bagian Organisasi	Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Belum puasnya masyarakat terhadap pelayanan publik
2	Peningkatan manajemen pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan publik	Tidak terkelolanya manajemen pelayanan publik	Kepala Bagian Organisasi	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait pelayanan	Terganggunya pelaksanaan pelayanan publik
3	Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Tersedianya produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah/Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesesuaian	Tidak tertatanya produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah/Perda	Kasubbag Perundang Undangan	kurangnya pemahaman OPD dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah	Tidak tercapainya pemahaman aturan terhadap produk hukum daerah yang diterbitkan
4	Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Nagari	Membantu memvalidasi, evaluasi dan klarifikasi produk hukum terutama peraturan nagari dan keputusan bupati yang dilahirkan oleh OPD dan Nagari	Tidak tersedianya produk hukum Daerah berupa keputusan bupati dan produk hukum nagari	Kasubbag Perundang Undangan	Kurangnya pemahaman OPD dalam menyusun rancangan Peraturan Nagari dan Keputusan Bupati	Tidak tercapainya pemahaman aturan terhadap produk hukum Nagari dan Keputusan Bupati.
5	Penyelesaian Sengketa Hukum	Untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan perkara, baik yang terkait dengan aset Pemerintah Daerah dan lain-lain	Mengakibatkan kerugian terhadap aset Pemda, Nagari dan Pembatalan Akta yang buat oleh Camat Selaku PPAT	kasubbag Bantuan Hukum dan HAM	Karena kurangnya dokumen yang dimiliki oleh Pemda, Nagari dan ketidaktelitian Camat selaku PPAT dalam proses penerbitan Akta.	Mengakibatkan kerugian terhadap obyek dan aset Pemda yang digugat
6	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah Tahun 2018	Tidak Terpublikasikan Perda dan Perbup di Kabupaten Pesisir Selatan	Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum	Karena Kurangnya Perda dan Perbup dalam pembuatan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah	Tidak tercapainya informasi dalam pembuatan buku lembaran daerah dan berita daerah
7	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Menjalin koordinasi dan guna mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Perusahaan Pers dan Wartawan	Media massa masih ada yang belum memahami aturan yang ada terkait dengan tugas kehumasan pemerintah sehingga publikasi da promosi melalui media massa pada tahun berjalan kurang baik	Kepala Bagian Humas & Protokoler	Kurangnya SDM dan pengetahuan dalam bidang kehumasan pemerintah serta masih banyak awak media yang belum paham dengan aturan yang ada	Penyelenggaraan administrasi kegiatan menjadi tidak baik serta hubungan dengan media massa kurang harmonis
8	Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Mendokumentasikan acara kegiatan pimpinan pemerintah daerah, sesuai moto " Kerjaku Membangun Pesisir Selatan" sekaligus sebagai "Rapor" Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Jika dokumentasi kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan OPD serta Sumber Daya Daerah potensial lainnya untuk disajikan di media masa pada tahun berjalan tidak baik maka membuat inventarisasi, pemeliharaan hasil dokumentasi kegiatan pada tahun berjalan akan mengalami kesulitan dalam membuat evaluasi kegiatan	Kepala Bagian Humas & Protokoler	Kurangnya SDM dan terbatasnya sarana-prasarana dalam mendokumentasikan kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan OPD serta Sumber Daya Daerah potensial lainnya	Pemeliharaan dan inventarisasi hasil dokumentasi masih terbatas pada kondisi yang ada saat ini. Sehingga hasil yang diinginkan untuk mengumpulkan dan mengolah data kegiatan menjadi sebuah informasi masih terbatas
9	Publikasi dan Promosi Daerah	Menyediakan media informasi melalui publikasi dan promosi daerah pada media cetak, eletronik dan siber guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi pembangunan, sesuai moto " Kerjaku Membangun Pesisir Selatan" sekaligus sebagai "Rapor" Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Jika SKPD tidak menyelenggarakan publikasi dan promosi daerah maka publik tidak akan dapat mengetahui perkembangan kegiatan daerah selama tahun berjalan dan mengakibatkan terjadinya berbagai macam persepsi di masyarakat	Kepala Bagian Humas & Protokoler	Masih sedikit inovasi dalam penyampaian informasi kepada publik yang terutama pada media elektronik dan media baru (siber dan sosmed)	Informasi yang disampaikan kepada publik masih terpaku kepada media cetak sehingga perlu didesiminasikan lagi informasi pada media yang lain yang mempunyai khalayak publik yang luas.
10	Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan baik.	Pengelolaan dokumen pengadaan barang dan jasa tidak tertata dengan baik dan rapi.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kesadaran Pokja ULP yang masih rendah untuk memberikan Resume / Bahan lelang kepada Bagian PBJ untuk di arsipkan.	Sulitnya mencari arsip dokumen / bahan pengadaan barang dan jasa tahun sebelumnya yang diminta oleh pemeriksa.
11	Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Terlaksananya proses pengadaan barang / jasa secara elektronik	Kurangnya jumlah SDM yang mengerti tentang prosedur penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur LPSE	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	terbatasnya pelatihan yang diikuti dan minimnya infrastruktur yang dimiliki oleh LPSE Kab.Pesisir Selatan	terbatasnya ASN dalam penigkatan SDM.
12	Fasilitasi Lelang dan Klarifikasi PBJ	Terfasilitasinya pelaksanaan lelang dan klarifikasi pengadaan barang dan jasa	Terlambatnya pelaksanaan lelang kegiatan	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	Kurangnya pemahaman dari penyedia barang/jasa tetang prosedur pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan lelang dan pengadaan barang dan jasa tidak berjalan dengan cepat dan sesuai prosedur
13	Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kurangnya Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kurangnya Pengetahuan SDM tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Terlambatnya proses pembinaan dan konsultasi pengadaan barang dan jasa

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1		2	3	4	5	6
14	Penyusunan LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instanssi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Masih Rendahnya peningkatan kinerja pemerintah daerah	Kepala Bagian Organisasi	Belum dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja pemerintah daerah	Tidak adanya evaluasi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah secara berkala
15	Monev E Sakip Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya Laporan penilaian kinerja SKPD	Masih Rendahnya peningkatan kinerja SKPD	Kepala Bagian Organisasi	Belum dilakukan nya evaluasi kinerja pada SKPD secara berjenjang	Tidak adanya evaluasi terhadap peningkatan kinerja SKPD
16	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat daerah	Tidak adanya peningkatan kinerja pejabat Struktural pada OPD	Kepala Bagian Organisasi	Belum dilakukannya evaluasi Jabatan secara berjenjang dan berkala pada OPD	Belum Maksimalnya evaluasi terhadap Jabatan pada OPD
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat Kedinasan	Jika surat tidak didistribusikan maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terlambatnya pendistribusian surat
18	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jika tagihan telepon, air dan listrik tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terputusnya jaringan terhadap telepon, air dan listrik kantor
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jika Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan sarana pendukung kinerja
20	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jika penyediaan Alat Tulis Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Keuangan	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Alat Tulis Kantor merupakan sarana pendukung kinerja
21	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakn dan Penggandaan untuk Operasional Kantor	Jika penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Keuangan	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Barang Cetakan dan Penggandaan merupakan sarana pendukung kinerja
22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Niaga Bahan Bakar Bersubsidi	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Energi Bersubsidi	Harga energi bersubsidi tidak sesuai dengan harga enceran tertinggi (HET)	Kepala Bagian Perekonomian	lambatnya para agen energi bersubsidi menyampaikan laporan	tidak terpantaunnya harga energi bersubsidi sesuai dengan harga enceran tertinggi
23	Pengembangan Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Belum tersedianya Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	terbatasnya anggaran pelayanan kesehatan bagi kepala daerah / wakil kepala daerah
24	Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Tersusunnya Perbup tentang kelembagaan	Jika Penataan dan Penguatan Kelembagaan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Organisasi	Belum dilaksanakan evaluasi Kelembagaan Pemda	Tidak kuatnya Kelembagaan Pemda
25	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Jika perbaikan peralatan kerja tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena peralatan kerja merupakan sarana pendukung kinerja
26	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Jika Kebersihan Kantor tidak terpelihara maka keindahan tidak tercipta	Kepala Bagian Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Tidak terciptanya kebersihan dan keindahan kantor
27	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD Setda yang baik	Penatausahaan Keuangan tidak sesuai dengan Peraturan	Kepala Bagian Keuangan	Kurangnya Pemahaman terhadap Peraturan terkait	Terlambatnya penyusunan dokumen dan laporan keuangan OPD
28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jika penyediaan alat listrik dan elektronik tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena alat listrik dan elektronik merupakan sarana pendukung kinerja
29	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jika Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena peralatan dan perlengkapan kantor merupakan sarana pendukung kinerja
30	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Jika Penyediaan Makananan dan Minuman tidak terpenuhi maka kebutuhan makan Tamu , Kepala daerah dan rapat akan terganggu dan capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan Pelayanan dan penyediaan kebutuhan makan kepala daerah, Tamu dan rapat karena penyediaan makan dan minum merupakan kebutuhan pokok Kepala daerah, pelayanan tamu daerah
31	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jika rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terhambatnya capaian kinerja OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya
32	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Dalam	Jika rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terhambatnya capaian kinerja OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya
33	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Sekretariat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tidak terlaksana secara maksimal	Kepala Bagian Keuangan	Kurangnya pemahamann dalam penyusunan anggaran dan pelaporan	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD
34	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Tersedianya jasa tenaga kerja Non PNS	Jika penyediaan jasa tenaga kerja Non PNS tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Keuangan	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Tetanggunanya pelaksanaan tugas dan kewajiban OPD

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1		2	3	4	5	6
35	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan	Jika penyediaan perlengkapan Rumah Jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan tugas Kepala Derah
36	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Jika peralatan gedung Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	SDM dan Dana yang tersedia	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena peralatan Gedung Kantor merupakan sarana pendukung kinerja
37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	Jika Pemeliharaan Rumah Jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Tergagungnya pelaksanaan tugas Kepala Daerah karena kondisi rumah jabatan yang tidak nyaman
38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	Jika pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas merupakan sarana pendukung kinerja dan akan terhentinya pembayaran honorarium pegawai penunjang kinerja baik yang berada di rumah pimpinan maupun di kantor
39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Jika pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor merupakan sarana pendukung kinerja
40	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Jika pemeliharaan Mobil Jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan tugas kepala daerah karena mobil jabatan merupakan sarana pendukung kinerja
41	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Jika pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional merupakan sarana pendukung kinerja
42	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan	Jika pemeliharaan Rumah jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan tugas kepala daerah karena kondisi perlengkapan rumah jabatan yang kurang nyaman
43	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas (KDH)	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan rumah dinas (KDH)	Jika penyediaan alat listrik dan elektronik tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena alat listrik dan elektronik merupakan sarana pendukung kinerja dan sarana Pendukung di rumah dinas Kepala Daerah
44	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (KDH)	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (KDH)	Jika rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terhambatnya capaian kinerja Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya KDH
45	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (KDH)	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (KDH)	Jika pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (KDH) tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (KDH) merupakan sarana pendukung dan Sarana Pokok agar tercapainya kinerja Kepala Daerah (KDH)
46	Pendataan dan Penataan dokumen/Arsip Daerah (Unit Arsip Ke Depo Arsip Daerah)	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip lingkup Sekretariat Daerah	Sulit dalam pencarian dokumen / arsip	Kepala Bagian Umum	Masih kurangnya pengetahuan SDM dan sarana dan prasarana dalam menata Arsip	Dokumen / Arip belum tertata dengan Baik
47	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tersedianya Dokumen Aset/Barang Sekretariat Daerah	Aset Sekretariat Daerah Tidak terkelola dengan baik	Kepala Bagian Keuangan	Aset belum tercatat ke dalam buku inventaris barang	Aset Sekretariat Daerah Tidak terkelola dengan baik
48	Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan	Tersusunnya Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan	Terlambatnya penyusunan Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	Kurangnya koordinasi instansi terkait dalam penyusunan Buku HSPK	proses kegiatan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan jadi terlambat
49	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan pembangunan daerah	Terlambatnya pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	tidak tepatnya waktu pelaksanaan kegiatan	proses kegiatan pembangunan jadi terlambat
50	Penyusunan Prosedur Kegiatan	Tersusunnya dokumen prosedur kegiatan	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	Terlambatnya pedoman pelaksanaan anggaran	Tertundanya pelaksanaan kegiatan
51	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya laporan DUK, Bezzeting, Kenaikan Pangkat, Berkala dll	Tertundanya kenaikan pangkat berkala dan tidak tertatanya administrasi kepegawaian	Kepala Bagian Organisasi	Penyampaian administrasi kepegawaian yang sering terlambat	Tertundanya pengurusan administrasi kepegawaian
52	Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan	Terlaksananya tugas-tugas Keprotokolan yang akan dihadiri oleh Pimpinan Pemerintah Daerah	Jika SKPD belum menyiapkan kebijakan dan pelayanan keprotokoleran daerah maka semua kegiatan yang berkaitan keprotokoleran daerah akan menjadi terganggu dan berdampak kepada citra daerah dalam hal yang bersifat protokoler	Kepala Bagian Humas & Protokoler	Masih kurangnya kemampuan SDM dan sarana-prasarana SKPD terkait pada kegiatan-kegiatan protokoler.	Pelaksanaan kegiatan-kegiatan keprotokoleran sering terganggu dengan hal-hal teknis dilapangan yang mengakibatkan kelancaran sebuah acara menjadi terhambat

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1		2	3	4	5	6
53	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	Terlaksananya fungsi koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan	Tidak sinkronnya pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan	Asisten II	Kurangnya koordinasi OPD bidang ekonomi dan pembangunan	Terganggunya pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan
54	Pengendalian dan Koordinasi Program Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian program/kegiatan pembangunan daerah	Kurangnya pengetahuan ASN tentang kegiatan pembangunan daerah	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	Rendahnya tingkat pengetahuan ASN terhadap program pengendalian daerah	Terlambatnya proses pengendalian kegiatan
55	Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati	Terlaksananya Fungsi Staf Ahli Bupati secara Optimal	Belum optimalnya fungsi Staf Ahli Bupati	Staf Ahli	Kurangnya ketrediaan anggaran	Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bupati kurang optimal
56	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Umum, Organisasi, dan Keuangan	Tidak sinkronnya pelaksanaan kegiatan bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Asisten III	Kurangnya koordinasi OPD bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Terganggunya pelaksanaan kegiatan bidang Umum, Organisasi dan Keuangan
57	Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum	Tidak sinkronnya pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Asisten I	Kurangnya koordinasi OPD bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Terganggunya pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
58	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara / Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Jika Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri merupakan sarana pendukung dan Standar Pelayanan Tamu Daerah.
59	Rapat Koordinasi Penyeleggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Kurangnya optimalnya penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten
60	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan tugas tugas pemerintahan di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah tidak terlaksana secara optimal	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya jumlah sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, masih kurangnya pemahaman SDM terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Terhambatnya capaian pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi
61	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan kewilayahan	Pelaksanaan Pembinaan belum terlaksana secara optimal	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya jumlah sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, masih kurangnya pemahaman SDM terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Pelaksanaan pembinaan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tujuan kegiatan tidak terpenuhi secara optimal
62	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perintah Daerah (LPPD) terlaksana cukup baik, namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dari unsur pendukung lampiran yang harus disajikan dalam laporan LPPD	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Masih kurangnya pengetahuan SDM dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, masih lemahnya komitmen dari masing masing SKPD dalam melaporkan dan melampirkan bahan pendukung laporan LPPD	Terlambatnya penyampaian laporan LPPD
63	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	Terfasilitasinya kerjasama antar daerah	Pelaksanaan kerjasama belum berjalan secara optimal dan terencana	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya pengetahuan SDM tentang kerjasama antar daerah	Kerjasama antar daerah atau antar lembaga tidak terlaksana dengan baik
64	Penilaian Kompetensi Camat dan Perangkatnya	Terlaksananya Penilaian Kompetensi Camat	Tertundanya pelaksanaan kompetensi camat se Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya pengetahuan SDM tentang Standar Kompetensi, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan penilaian kompetensi camat tidak optimal
65	Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami	Tersusunnya dokumen penamaan rupa bumi dan unsur alami	Terlambatnya penyusunan dokumen penamaan rupa bumi dan unsur alami	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana	Penyusunan dokumen penamaan rupa bumi tidak terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
66	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan	Terfasilitasinya penegasan batas daerah dan kecamatan	Terlambatnya penyusunan dokumen batas daerah dan kecamatan	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana	Penyusunan dokumen batas daerah kecamatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
67	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Terlambatnya penyusunan dokumen LKPJ	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya jumlah SDM dalam menyusun dokumen LKPJ dan lambatnya OPD menyampaikan data-data pendukung	Penyusunan dokumen LKPJ tidak terlaksana sesuai dengan target waktu yang ditetapkan
68	Fasilitasi Kerjasama Rantau	Terbentuknya Nagari binaan Perantau	Tidak terbentuknya nagari binaan perantau	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya koordinasi dengan para perantau	Pembentukan nagari binaan perantau tidak sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan
69	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Peptisida	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan pestisida	Harga pupuk dan pestisida bersubsidi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)	Kepala Bagian Perekonomian	Lambatnya para agen pupuk bersubsidi menyampaikan laporan	Tidak terpantaunya harga pupuk besubsidi dan pestisida

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1		2	3	4	5	6
70	Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan	Terlaksananya koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	Koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan tidak terlaksana secara optimal	Kepala Bagian Perekonomian	Kurangnya koordinasi OPD terkait peningkatan ekonomi pesisir selatan	Tidak tercapainya target peningkatan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan
71	Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Terkendalnya Harga dan Inflasi Daerah di Kab. Pesisir Selatan	Pengendalian harga dan inflasi daerah belum terlaksana secara optimal	Kepala Bagian Perekonomian	Kurang Terkendalnya harga dan inflasi di daerah Kab.Pesisir Selatan	Meningkatnya harga dan inflasi di daerah Kab.Pesisir Selatan
72	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Bagian Perekonomian	Banyaknya BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan belum mendapat pembinaan	Tidak tersedianya data BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan
73	Safari Keagamaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Safari Ramadhan oleh Tim Silaturahmi Pemda	Minimnya informasi pembangunan dan penjelasan tentang isu krusial yang berkembang di tengah masyarakat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya Jumlah dan pemerataan wilayah yang dikunjungi oleh Tim	Berkurangnya wahana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
74	Facilitasi Penyelenggaraan MTQ	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	Kurangnya pembinaan utusan MTQ Kabupaten terpilih untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya frekuensi pemusatan latihan dan kehadiran peserta	Kurang siapnya utusan MTQ Kabupaten terpilih untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi
75	Facilitasi Pelayanan Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Keberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji	Terlambatnya pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Terlambatnya penyediaan transportasi dan kurangnya informasi perubahan jadwal keberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji	Tidak terfasilitasinya proses pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan
76	Pembinaan Didikan Shubuh Tergiat	Terbinanya lembaga didikan subuh	Kurangnya pembinaan Lembaga Didikan Subuh Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dinilai Provinsi	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya Pembinaan, monitoring, dan evaluasi	Kurang siapnya Lembaga Didikan Subuh Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dinilai Provinsi
77	Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagaman	Terlaksananya koordinasi dan kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Tidak terlaksananya koordinasi kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rendahnya partisipasi OPD terkait kesejahteraan dan urusan keagamaam	Tidak sinkronnya pelaksanaan kegiatan terkait kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan
78	Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Terkelolanya Pemberian Hibah Bansos	Keterlambatan pendistribusian hibah bansos	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Keterlambatan pengiriman dokumen kelengkapan dari penerima hibah bansos dan adanya perubahan persyaratan kelengkapan administrasi	Keterlambatan pengiriman laporan keuangan dan verifikasi
79	Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Terbinanya Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Pelaksanaan pembinaan pondok pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran kurang optimal	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya ketersediaan anggaran dan ketersediaan data pondok pesantrean, MDTA dan Pondok Alquran	Tidak terbinanya Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran
80	Peningkatan Imtaq bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam	Terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kurang terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Bagian Kesra	Kurangnya ketersediaan anggaran Kegiatan Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Tidak terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
81	Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya monitoring Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Kurang terbinanya UKS Kabupaten untuk penilaian tingkat propinsi	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya kerjasama dan dukungan stake holder dan lintas sektor	Kurangnya kesiapan UKS Kabupaten untuk penilaian tingkat propinsi
82	Facilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Menurunnya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika	Rendahnya kesadaran tentang bahaya Narkotika	Kepala Bagian Kesbangpol	Banyaknya masyarakat yang memakai dan mengedarkan Narkotika	Meningkatnya pemakaian narkotika pada masyarakat
83	Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Terjadinya gangguan kemanan akibat pengembangan aliran kepercayaan	Kepala Bagian Kesbangpol	Banyaknya aliran kepercayaan yang berkembang pada masyarakat	Terganggunya Keamanan, ketertiban dan stabilitas daerah di kabupaten Pesisir Selatan
84	Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya operasionalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial	Tidak optimalnya penanganan konflik sosial	Kepala Bagian Kesbangpol	Kurangnya koodinasi antara instansi terkait penanganan konflik sosial	Meningkatnya kasus konflik sosial di Masyarakat
85	Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Saber Pungli	Meningkatnya Pungutan liar	Kepala Bagian Kesbangpol	Kurangnya koordinasi instansi terkait dalam pemberantasan pungutan liar	Meningkatnya Pungutan Liar oleh Aparatur Pemerintahan
86	Facilitasi Pelaksanaan dan Pelaporan RANHAM	Tersusunnya Laporan RANHAM	Meningkatnya Pelanggaran terhadap HAM	Kasubbang Bantuan Hukum dan HAM	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM	Meningkatnya Pelanggaran terhadap HAM
87	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Meningkatnya gangguan ketertiban umum di dalam masyarakat	Kepala Bagian Kesbangpol	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam forum kewaspadaan dini masyarakat	Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban umum

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1		2	3	4	5	6
88	Pemasyarakatan Olahraga aparatur	Terlaksananya kegiatan olahraga bagi aparatur	Rendahnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan olahraga	Kepala Bagian Kesra	Kurangnya partisipasi ASN untuk mengikuti kegiatan olahraga	Tidak terlaksananya kegiatan olahraga rutin bagi ASN
89	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Kurang terlaksananya Koordinasi antar Pimpinan Daerah	Kasubag Partisipasi Politik dan Fasilitasi Pemilu	Terbatasnya anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Kurang Sinergi antar Pimpinan Daerah dalam Koordinasi
90	Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kurang maksimalnya Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kasubag Penanganan Konflik	Terbatasnya anggaran Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	kurangnya sinergisitas kegiatan koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

ANALISIS RISIKO

SKPD: Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terukurnya IKM dengan nilai yang lebih baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih bernilai kurang baik	Kepala Bagian Organisasi	Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Belum puasnya masyarakat terhadap pelayanan publik	2,00	3,00	6,00
2	Meningkatnya pelayanan publik	Tidak terkelolanya manajemen pelayanan publik	Kepala Bagian Organisasi	Kurangnya koordinisasi antar instansi terkait pelayanan	Terganggunya pelaksanaan pelayanan publik	2,00	2,00	4,00
3	Tersedianya produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah/Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Tidak tertatanya produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah/Perda	Kasubbag Perundang Undangan	kurangnya pemahaman OPD dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah	Tidak tercapainya pemahaman aturan terhadap produk hukum daerah yang diterbitkan	2,00	3,00	2,00
4	Membantu memvalidasi, evaluasi dan klarifikasi produk hukum terutama peraturan nagari dan keputusan bupati yang dilahirkan oleh OPD dan Nagari	Tidak tersedianya produk hukum Daerah berupa keputusan bupati dan produk hukum nagari	Kasubbag Perundang Undangan	Kurangnya pemahaman OPD dalam menyusun rancangan Peraturan Nagari dan Keputusan Bupati	Tidak tercapainya pemahaman aturan terhadap produk hukum Nagari dan Keputusan Bupati.	2,00	3,00	4,00
5	Untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan perkara, baik yang terkait dengan aset Pemerintah Daerah dan lain-lain	Mengakibatkan kerugian terhadap aset Pemda, Nagari dan Pembatalan Akta yang buat oleh Camat Selaku PPAT	kasubbang Bantuan Hukum dan HAM	Karena kurangnya dokumen yang dimiliki oleh Pemda, Nagari dan ketidaktelitian Camat selaku PPAT dalam proses penerbitan Akta.	Mengakibatkan kerugian terhadap obyek dan aset Pemda yang digugat	2,00	3,00	4,00
6	Terlaksananya Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah Tahun 2018	Tidak Terpublikasikan Perda dan Perbup di Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Bagian Hukum	Karena Kurangnya Perda dan Perbup dalam pembuatan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah	Tidak tercapainya informasi dalam pembuatan buku lembaran daerah dan berita daerah	2,00	3,00	4,00
7	Menjalin koordinasi dan guna mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Perusahaan Pers dan Wartawan	Media massa masih ada yang belum memahami aturan yang ada terkait dengan tugas kehumasan pemerintah sehingga publikasi da promosi melalui media massa pada tahun berjalan kurang baik	Kepala Bagian Humas & Protokol	Kurangnya SDM dan pengetahuan dalam bidang kehumasan pemerintah serta masih banyak awak media yang belum paham dengan aturan yang ada	Penyelenggaraan administrasi kegiatan menjadi tidak baik serta hubungan dengan media massa kurang harmonis	2,00	2,00	4,00

8	Mendokumentasikan acara kegiatan pimpinan pemerintah daerah, sesuai moto “ Kerjaku Membangun Pesisir Selatan” sekaligus sebagai “Rapor” Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Jika dokumentasi kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan OPD serta Sumber Daya Daerah potensial lainnya untuk disajikan di media masa pada tahun berjalan tidak baik maka membuat inventarisasi, pemeliharaan hasil dokumentasi kegiatan pada tahun berjalan akan mengalami kesulitan dalam membuat evaluasi kegiatan	Kepala Bagian Humas & Protokol	Kurangnya SDM dan terbatasnya sarana-prasarana dalam mendokumentasikan kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan OPD serta Sumber Daya Daerah potensial lainnya	Pemeliharaan dan inventarisasi hasil dokumentasi masih terbatas pada kondisi yang ada saat ini. Sehingga hasil yang diinginkan untuk mengumpulkan dan mengolah data kegiatan menjadi sebuah informasi masih terbatas	2,00	2,00	4,00
9	Menyediakan media informasi melalui publikasi dan promosi daerah pada media cetak, eletronik dan siber guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap imformasi pembangunan, sesuai moto “ Kerjaku Membangun Pesisir Selatan” sekaligus sebagai “Rapor” Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Jika SKPD tidak menyelenggarakan publikasi dan promosi daerah maka publik tidak akan dapat mengetahui perkembangan kegiatan daerah selama tahun berjalan dan mengakibatkan terjadinya berbagai macam persepsi di masyarakat	Kepala Bagian Humas & Protokol	Masih sedikit inovasi dalam penyampaian informasi kepada publik yang terutama pada media elektronik dan media baru (siber dan sosmed)	Informasi yang disampaikan kepada publik masih terpaku kepada media cetak sehingga perlu didesiminasikan lagi informasi pada media yang lain yang mempunyai khalayak publik yang luas.	2,00	2,00	4,00
10	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan baik.	Pengelolaan dokumen pengadaan barang dan jasa tidak tertata dengan baik dan rapi.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kesadaran Pokja ULP yang masih rendah untuk memberikan Resume / Bahan lelang kepada Bagian PBJ untuk di arsipkan.	Sulitnya mencari arsip dokumen / bahan pengadaan barang dan jasa tahun sebelumnya yang diminta oleh pemeriksa.	2,00	2,00	4,00
11	Terlaksananya proses pengadaan barang / jasa secara elektronik	Kurangnya jumlah SDM yang mengerti tentang prosedur penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur LPSE	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	terbatasnya pelatihan yang diikuti dan minimnya infrastruktur yang dimiliki oleh LPSE Kab.Pesisir Selatan	terbatasnya ASN dalam penigkatan SDM.	3,00	3,00	9,00
12	Terfasilitasinya pelaksanaan lelang dan klarifikasi pengadaan barang dan jasa	Terlambatnya pelaksanaan lelang kegiatan	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	Kurangnya pemahaman dari penyedia barang/jasa tetang prosedur pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan lelang dan pengadaaan barang dan jasa tidak berjalan dengan cepat dan sesuai prosedur	2,00	3,00	6,00
13	Terlaksananya Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kurangnya Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kurangnya Pengetahuan SDM tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Terlambatnya proses pembinaan dan konsultasi pengadaan barang dan jasa	2,00	3,00	6,00
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instanssi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Masih Rendahnya peningkatan kinerja pemerintah daerah	Kepala Bagian Organisasi	Belum dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja pemerintah daerah	Tidak adanya evaluasi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah secara berkala	3,00	3,00	9,00
15	Tersedianya Laporan penilaian kinerja SKPD	Masih Rendahnya peningkatan kinerja SKPD	Kepala Bagian Organisasi	Belum dilakukan nya evaluasi kinerja pada SKPD secara berjenjang	Tidak adanya evaluasi terhadap peningkatan kinerja SKPD	2,00	3,00	6,00
16	Tersusunnya dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat daerah	Tidak adanya peningkatan kinerja pejabat Struktural pada OPD	Kepala Bagian Organisasi	Belum dilakukannya evaluasi Jabatan secara berjenjang dan berkala pada OPD	Belum Maksimalnya evaluasi terhadap Jabatan pada OPD	2,00	3,00	6,00

17	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat Kedinasan	Jika surat tidak didistribusikan maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terlambatnya pendistribusian surat	2,00	2,00	4,00
18	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jika tagihan telepon, air dan listrik tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terputusnya jaringan terhadap telepon, air dan listrik kantor	1,00	2,00	2,00
19	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jika Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan sarana pendukung kinerja	1,00	2,00	2,00
20	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jika penyediaan Alat Tulis Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Keuangan	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Alat Tulis Kantor merupakan sarana pendukung kinerja	1,00	2,00	2,00
21	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jika penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Keuangan	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Barang Cetak dan Penggandaan merupakan sarana pendukung kinerja	1,00	2,00	2,00
22	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Energi Bersubsidi	Harga energi bersubsidi tidak sesuai dengan harga enceran tertinggi (HET)	Kepala Bagian Perekonomian	lambatnya para agen energi bersubsidi menyampaikan laporan	tidak terpantaunnya harga energi bersubsidi sesuai dengan harga enceran tertinggi	1,00	2,00	2,00
23	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jika Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak terpenuhi maka Kesehatan tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya layanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tidak adanya layanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,00	2,00	2,00
24	Meningkatnya Kualitas Penguatan Kelembagaan	Jika Penataan dan Penguatan Kelembagaan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Organisasi	Belum dilaksanakan evaluasi Kelembagaan Pemda	Tidak kuatnya Kelembagaan Pemda	1,00	2,00	2,00
25	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Jika perbaikan peralatan kerja tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena peralatan kerja merupakan sarana pendukung kinerja	2,00	2,00	4,00
26	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Jika Kebersihan Kantor tidak terpelihara maka keindahan tidak tercipta	Kepala Bagian Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Tidak terciptanya kebersihan dan keindahan kantor	2,00	2,00	4,00
27	Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD Setda yang baik	Penatausahaan Keuangan tidak sesuai dengan Peraturan	Kepala Bagian Keuangan	Kurangnya Pemahaman terhadap Peraturan terkait	Terlambatnya penyusunan dokumen dan laporan keuangan OPD	2,00	3,00	6,00
28	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jika penyediaan alat listrik dan elektronik tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena alat listrik dan elektronik merupakan sarana pendukung kinerja	2,00	2,00	4,00

29	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jika Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena peralatan dan perlengkapan kantor merupakan sarana pendukung kinerja	2,00	2,00	4,00
30	Tersedianya makanan dan minuman	Jika Penyediaan Makanan dan Minuman tidak terpenuhi maka kebutuhan makan Tamu , Kepala daerah dan rapat akan terganggu dan capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan Pelayanan dan penyediaan kebutuhan makan kepala daerah, Tamu dan rapat karena penyediaan makan dan minum merupakan kebutuhan pokok Kepala daerah, pelayanan tamu daerah	2,00	2,00	4,00
31	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jika rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terhambatnya capaian kinerja OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya	2,00	2,00	4,00
32	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Dalam	Jika rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terhambatnya capaian kinerja OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya	2,00	2,00	4,00
33	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Sekretariat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tidak terlaksana secara maksimal	Kepala Bagian Keuangan	Kurangnya pemahaman dalam penyusunan anggaran dan pelaporan	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	2,00	2,00	4,00
34	Tersedianya jasa tenaga kerja Non PNS	Jika penyediaan jasa tenaga kerja Non PNS tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Keuangan	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Tetangggunya pelaksanaan tugas dan kewajiban OPD	1,00	2,00	2,00
35	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan	Jika penyediaan perlengkapan Rumah Jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan tugas Kepala Derah	1,00	2,00	2,00
36	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Jika peralatan gedung Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	SDM dan Dana yang tersedia	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena peralatan Gedung Kantor merupakan sarana pendukung kinerja	2,00	2,00	4,00
37	Terpeliharanya Rumah Jabatan	Jika Pemeliharaan Rumah Jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Tergagngunya pelaksanaan tugas Kepala Daerah karena kondisi rumah jabatan yang tidak nyaman	2,00	2,00	4,00
38	Terpeliharanya Rumah Dinas	Jika pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas merupakan sarana pendukung kinerja dan akan terhentinya pembayaran honorarium pegawai penunjang kinerja baik yang berada di rumah pimpinan maupun di kantor	2,00	2,00	4,00

39	Terpeliharanya Gedung Kantor	Jika pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor merupakan sarana pendukung kinerja	2,00	2,00	4,00
40	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Jika pemeliharaan Mobliil Jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan tugas kepala daerah karena mobil jabatan merupakan sarana pendukung kinerja	2,00	2,00	4,00
41	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Jika pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional merupakan sarana pendukung kinerja	3,00	2,00	6,00
42	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan	Jika pemeliharaan Rumah jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan tugas kepala daerah karena kondisi perlengkapan rumah jabatan yang kurang nyaman	1,00	2,00	2,00
43	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan rumah dinas (KDH)	Jika penyediaan alat listrik dan elektronik tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena alat listrik dan elektronik merupakan sarana pendukung kinerja dan sarana Pendukung dirumah dinas Kepala Daerah	1,00	2,00	2,00
44	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (KDH)	Jika rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terhambatnya capaian kinerja Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya KDH	1,00	2,00	2,00
45	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (KDH)	Jika pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (KDH) tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya SDM dan Anggaran yang tersedia	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (KDH)	2,00	2,00	2,00
46	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip lingkup Sekretariat Daerah	Sulit dalam pencarian dokumen / arsip	Kepala Bagian Umum	Masih kurangnya pengetahuan SDM dan sarana dan prasarana dalam menata Arsip	Dokumen / Arip belum tertata dengan Baik	3,00	2,00	2,00
47	Tersedianya Dokumen Aset/Barang Sekretariat Daerah	Aset Sekretariat Daerah Tidak terkelola dengan baik	Kepala Bagian Keuangan	Aset belum tercatat ke dalam buku inventaris barang	Aset Sekretariat Daerah Tidak terkelola dengan baik	2,00	3,00	2,00
48	Tersusunnya Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan	Terlambatnya penyusunan Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	Kurangnya koordinasi instansi terkait dalam penyusunan Buku HSPK	proses kegiatan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan jadi terlambat	2,00	3,00	1,00

49	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan pembangunan daerah	Terlambatnya pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	tidak tepatnya waktu pelaksanaan kegiatan	proses kegiatan pembangunan jadi terlambat	2,00	3,00	6,00
50	Tersusunnya dokumen prosedur kegiatan	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	Terlambatnya pedoman pelaksanaan anggaran	Tertundanya pelaksanaan kegiatan	2,00	3,00	2,00
51	Tersedianya laporan DUK, Bezetting, Kenaikan Pangkat, Berkala dll	Tertundanya kenaikan pangkat berkala dan tidak tertatanya administrasi kepegawaian	Kepala Bagian Organisasi	Penyampaian administrasi kepegawaian yang sering terlambat	Tertundanya pengurusan administrasi kepegawaian	1,00	3,00	3,00
52	Terlaksananya tugas-tugas Keprotokolanan yang akan dihadiri oleh Pimpinan Pemerintah Daerah	Jika SKPD belum menyiapkan kebijakan dan pelayanan keprotokoleran daerah maka semua kegiatan yang berkaitan keprotokoleran daerah akan menjadi terganggu dan berdampak kepada citra daerah dalam hal yang bersifat protokoler	Kepala Bagian Humas & Protokoler	Masih kurangnya kemampuan SDM dan sarana-prasarana SKPD terkait pada kegiatan-kegiatan protokoler.	Pelaksanaan kegiatan-kegiatan keprotokoleran sering terganggu dengan hal-hal teknis dilapangan yang mengakibatkan kelancaran sebuah acara menjadi terhambat	2,00	3,00	6,00
53	Terlaksananya fungsi koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan	Tidak sinkronnya pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan	Asisten II	Kurangnya koordinasi OPD bidang ekonomi dan pembangunan	Terganggunya pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan	2,00	3,00	2,00
54	Terlaksananya pengendalian program/kegiatan pembangunan daerah	Kurangnya pengetahuan ASN tentang kegiatan pembangunan daerah	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	Rendahnya tingkat pengetahuan ASN terhadap program pengendalian daerah	Terlambatnya proses pengendalian kegiatan	3,00	3,00	6,00
55	Terlaksananya Fungsi Staf Ahli Bupati secara Optimal	Belum optimalnya fungsi Staf Ahli Bupati	Staf Ahli	Kurangnya ketrediaan anggaran	Pelaksanaan Tugas Staf Ahli Bupati kurang optimal	2,00	1,00	2,00
56	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Umum, Organisasi, dan Keuangan	Tidak sinkronnya pelaksanaan kegiatan bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Asisten III	Kurangnya koordinasi OPD bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Terganggunya pelaksanaan kegiatan bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	2,00	1,00	6,00
57	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum	Tidak sinkronnya pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Asisten I	Kurangnya koordinasi OPD bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Terganggunya pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	2,00	1,00	2,00
58	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara / Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Jika Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Kepala Bagian Umum	Kurangnya ketersediaan anggaran	Terganggunya pelaksanaan pekerjaan karena Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri merupakan sarana pendukung dan Standar Pelayanan Tamu Daerah.	2,00	2,00	4,00
59	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Kurangnya optimalnya penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	2,00	2,00	2,00

60	Terfasilitasnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan tugas tugas pemerintahan di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah tidak terlaksana secara optimal	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya jumlah sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, masih kurangnya pemahaman SDM terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Terhambatnya capaian pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi	2,00	2,00	4,00
61	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan kewilayahan	Pelaksanaan Pembinaan belum terlaksana secara optimal	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya jumlah sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, masih kurangnya pemahaman SDM terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Pelaksanaan pembinaan tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tujuan kegiatan tidak terpenuhi secara optimal	2,00	2,00	4,00
62	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perintah Daerah (LPPD) terlaksana cukup baik, namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dari unsur pendukung lampiran yang harus disajikan dalam laporan LPPD	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Masih kurangnya pengetahuan SDM dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, masih lemahnya komitmen dari masing masing SKPD dalam melaporkan dan melampirkan bahan pendukung laporan LPPD	Terlambatnya penyampaian laporan LPPD	2,00	2,00	4,00
63	Terfasilitasnya kerjasama antar daerah	Pelaksanaan kerjasama belum berjalan secara optimal dan terencana	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya pengetahuan SDM tentang kerjasama antar daerah	Kerjasama antar daerah atau antar lembaga tidak terlaksana dengan baik	2,00	2,00	4,00
64	Terlaksananya Penilaian Kompetensi Camat	Tertundanya pelaksanaan kompetensi camat se Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya pengetahuan SDM tentang Standar Kompetensi, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan penilaian kompetensi camat tidak optimal	2,00	2,00	4,00
65	Tersusunnya dokumen penamaan rupa bumi dan unsur alami	Terlambatnya penyusunan dokumen penamaan rupa bumi dan unsur alami	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana	Penyusunan dokumen penamaan rupa bumi tidak terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	2,00	2,00	4,00
66	Terfasilitasnya penegasan batas daerah dan kecamatan	Terlambatnya penyusunan dokumen batas daerah dan kecamatan	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana	Penyusunan dokumen batas daerah kecamatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan	2,00	3,00	6,00
67	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Terlambatnya penyusunan dokumen LKPJ	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya jumlah SDM dalam menyusun dokumen LKPJ dan lambatnya OPD menyampaikan data-data pendukung	Penyusunan dokumen LKPJ tidak terlaksana sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	2,00	3,00	6,00
68	Terbentuknya Nagari binaan Perantau	Tidak terbentuknya nagari binaan perantau	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kurangnya koordinasi dengan para perantau	Pembentukan nagari binaan perantau tidak sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan	2,00	2,00	4,00

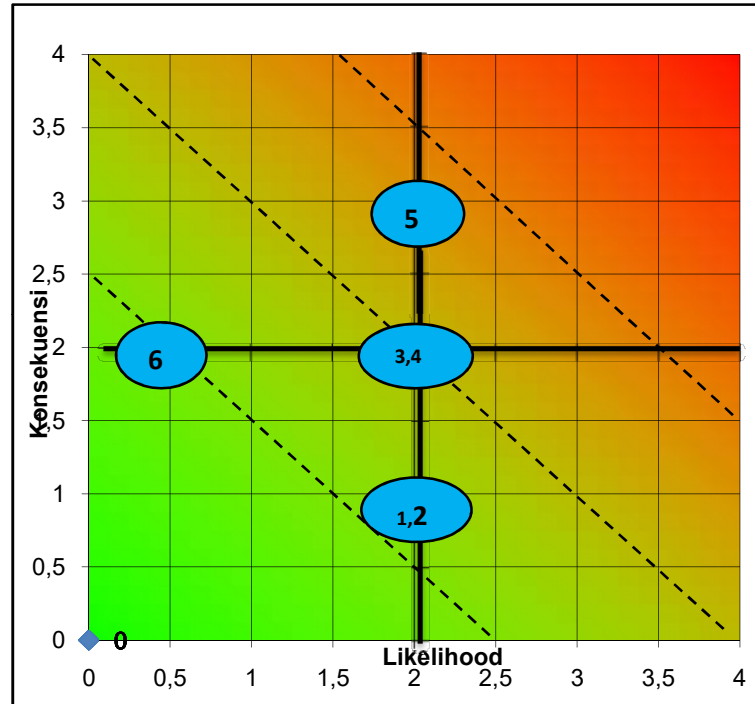
69	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan pestisida	Harga pupuk dan pestisida bersubsidi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)	Kepala Bagian Perekonomian	Lambatnya para agen pupuk bersubsidi menyampaikan laporan	Tidak terpantaunya harga pupuk bersubsidi dan pestisida	3,00	3,00	9,00
70	Terlaksananya koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	Koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan tidak terlaksana secara optimal	Kepala Bagian Perekonomian	Kurangnya koordinasi OPD terkait peningkatan ekonomi pesisir selatan	Tidak tercapainya target peningkatan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan	2,00	2,00	4,00
71	Terkendalnya Harga dan Inflasi Daerah di Kab. Pesisir Selatan	Pengendalian harga dan inflasi daerah belum terlaksana secara optimal	Kepala Bagian Perekonomian	Kurang Terkendalnya harga dan inflasi di daerah Kab.Pesisir Selatan	Meningkatnya harga dan inflasi di daerah Kab.Pesisir Selatan	2,00	2,00	4,00
72	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Bagian Perekonomian	Banyaknya BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan belum mendapat pembinaan	Tidak tersedianya data BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	2,00	2,00	4,00
73	Terlaksananya Safari Ramadhan oleh Tim Silaturahmi Pemda	Minimnya informasi pembangunan dan penjelasan tentang isu krusial yang berkembang di tengah masyarakat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya Jumlah dan pemerataan wilayah yang dikunjungi oleh Tim	Berkurangnya wahana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat	2,00	2,00	4,00
74	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	Kurangnya pembinaan utusan MTQ Kabupaten terpilih untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya frekuensi pemusatan latihan dan kehadiran peserta	Kurang siapnya utusan MTQ Kabupaten terpilih untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi	2,00	2,00	4,00
75	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Keberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji	Terlambatnya pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Terlambatnya penyediaan transportasi dan kurangnya informasi perubahan jadwal keberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji	Tidak terfasilitasinya proses pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan	1,00	2,00	4,00
76	Terbinanya lembaga didikan subuh	Kurangnya pembinaan Lembaga Didikan Subuh Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dinilai Provinsi	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya Pembinaan, monitoring, dan evaluasi	Kurang siapnya Lembaga Didikan Subuh Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dinilai Provinsi	2,00	2,00	4,00
77	Terlaksananya koordinasi dan kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Tidak terlaksananya koordinasi kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rendahnya partisipasi OPD terkait kesejahteraan dan urusan keagamaam	Tidak sinkronnya pelaksanaan kegiatan terkait kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	2,00	2,00	4,00
78	Terkelolanya Pemberian Hibah Bansos	Keterlambatan pendistribusian hibah bansos	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Keterlambatan pengiriman dokumen kelengkapan dari penerima hibah bansos dan adanya perubahan persyaratan kelengkapan administrasi	Keterlambatan pengiriman laporan keuangan dan verifikasi	2,00	2,00	4,00
79	Terbinanya Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Pelaksanaan pembinaan pondok pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran kurang optimal	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya ketersediaan anggaran dan ketersediaan data pondok pesantren, MDTA dan Pondok Alquran	Tidak terbinanya Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	2,00	2,00	4,00

80	Terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kurang terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Bagian Kesra	Kurangnya ketersediaan anggaran Kegiatan Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tidak terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	2,00	2,00	4,00
81	Terlaksananya monitoring Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Kurang terbinanya UKS Kabupaten untuk penilaian tingkat propinsi	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya kerjasama dan dukungan stake holder dan lintas sektor	Kurangnya kesiapan UKS Kabupaten untuk penilaian tingkat propinsi	1,00	2,00	2,00
82	Menurunnya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika	Rendahnya kesadaran tentang bahaya Narkotika	Kepala Bagian Kesbangpol	Banyaknya masyarakat yang memakai dan mengedarkan Narkotika	Meningkatnya pemakaian narkotika pada masyarakat	3,00	2,00	4,0
83	Terlaksananya pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Terjadinya gangguan kemanan akibat pengembangan aliran kepercayaan	Kepala Bagian Kesbangpol	Banyaknya aliran kepercayaan yang berkembang pada masyarakat	Terganggunya Keamanan, ketertiban dan stabilitas daerah di kabupaten Pesisir Selatan	2,00	3,00	6,00
84	Terlaksananya operasionalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial	Tidak optimalnya penanganan konflik sosial	Kepala Bagian Kesbangpol	Kurangnya koodinasi antara instansi terkait penanganan konflik sosial	Meningkatnya kasus konflik sosial di Masyarakat	2,00	3,00	4,00
85	Terlaksananya Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Saber Pungli	Meningkatnya Pungutan liar	Kepala Bagian Kesbangpol	Kurangnya koordinasi instansi terkait dalam pemberantasan pungutan liar	Meningkatnya Pungutan Liar oleh Aparatur Pemerintahan	2,00	3,00	6,00
86	Tersusunnya Laporan RANHAM	Meningkatnya Pelanggaran terhadap HAM	Kasubbbang Bantuan Hukum dan HAM	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM	Meningkatnya Pelanggaran terhadap HAM	3,00	3,00	9,00
87	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Meningkatnya gangguan ketertiban umum di dalam masyarakat	Kepala Bagian Kesbangpol	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam forum kewaspadaan dini masyarakat	Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban umum	2,00	3,00	6,00
88	Terlaksananya kegiatan olahraga bagi aparatur	Rendahnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan olahraga	Kepala Bagian Kesra	Kurangnya partisipasi ASN untuk mengikuti kegiatan olahraga	Tidak terlaksananya kegiatan olahraga rutin bagi ASN	3,00	2,00	6,00
89	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Kurang terlaksananya Koordinasi antar Pimpinan Daerah	Kepala Bagian Kesbangpol	Terbatasnya anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Kurang Sinergi antar Pimpinan Daerah dalam Koordinasi	3,00	2,00	6,00
90	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kurang maksimalnya Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kepala Bagian Kesbangpol	dan Konsultasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	2,00	2,00	4,00

Ket:

- 1 Kolom 1 berisi no urutan
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
- 3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
- 4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
- 5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
- 6 Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
- 7 Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut.
- 8 Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7

PETA RISIKO



Keterangan:

Tingkat I : Level risiko sangat rendah (hijau)

Tingkat II : Level risiko rendah (hijau muda)

Tingkat III : Level risiko tinggi (kuning)

Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi (merah)

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terukurnya IKM dengan nilai yang lebih baik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih bernilai kurang baik	Sosialisasi mengenai indeks kepuasan masyarakat kepada OPD pelayanan publik	Telah dilakukan survey kepada beberapa OPD pelayanan	Efektif	Melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan IKM	Kepala Bagian Organisasi	12 bulan
2	Meningkatnya pelayanan publik	Tidak terkelolanya manajemen pelayanan publik	Penyusunan laporan hasil evaluasi peningkatan manajemen pelayanan publik	Sosialisasi peningkatan manajemen pelayanan publik	Efektif	Penyusunan laporan hasil evaluasi peningkatan manajemen pelayanan publik	Kepala Bagian Organisasi	12 bulan
3	Tersedianya produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah/Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Tidak tertatanya produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah/Perda	Meningkatkan SDM OPD dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah	Penetapan Tim asistensi Pembentukan dan Pembahasan Ranperda	Efektif	Melakukan Pembinaan Penyusunan Ranperda / Perda terhadap OPD	Kepala Bagian Hukum	12 bulan
4	Membantu menvalidasi, evaluasi dan klarifikasi produk hukum terutama peraturan nagari dan keputusan bupati yang dilahirkan oleh OPD dan Nagari	Tidak tersedianya produk hukum Daerah berupa keputusan bupati dan produk hukum nagari	Meningkatkan SDM OPD dalam menyusun Rancangan keputusan Bupati dan SDM Wali Nagari Dalam menyusun Peraturan Nagari	tim Validasi, evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan produk Hukum Nagari	Efektif	Melakukan pembinaan penyusunan Peraturan nagari terhadap wali nagari dan melakukan pembinaan membuat keputusan bupati terhadap OPD	Kepala Bagian Hukum	12 bulan
5	Untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan perkara, baik yang terkait dengan aset Pemerintah Daerah dan lain-lain	Mengakibatkan kerugian terhadap aset Pemda, Nagari dan Pembatalan Akta yang buat oleh Camat Selaku PPAT	Melakukan sosialisai tentang HAM kepada masyarakat	Melakukan idenfikasi dan penyusunan laporan terhadap pelanggaran HAM	Efektif	Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan HAM	Kepala Bagian Hukum	12 bulan
6	Terlaksananya Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah Tahun 2018	Tidak terlaksananya pembuatan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah Tahun 2018	Mempublikasikan Produk Hukum Daerah dengan Website yang bisa diakses secara online	Tersedianya Buku Lembaran Daerah dan Buku Berita Daerah Tahun 2018	Efektif	Penyimpanan Produk Hukum Daerah secara Digital	Kepala Bagian Hukum	12 bulan
7	Menjalin koordinasi dan guna mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Perusahaan Pers dan Wartawan	Media massa masih ada yang belum memahami aturan yang ada terkait dengan tugas kehumasan pemerintah sehingga publikasi da promosi melalui media massa pada tahun berjalan kurang baik	Menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara kerja sama OPD dengan Media Massa	Kerja sama dengan media massa yang belum terstandarisasi dengan baik	belum efektif	Penetapan Standar Operasional Prosedur tentang tata cara kerja sama dengan media massas	Kepala Bagian Humas & Protokol	12 bulan

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Mendokumentasikan acara kegiatan pimpinan pemerintah daerah, sesuai moto “ Kerjaku Membangun Pesisir Selatan” sekaligus sebagai “Rapor” Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Jika dokumentasi kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan OPD serta Sumber Daya Daerah potensial lainnya untuk disajikan di media masa pada tahun berjalan tidak baik maka membuat inventarisasi, pemeliharaan hasil dokumentasi kegiatan pada tahun berjalan akan mengalami kesulitan dalam membuat evaluasi kegiatan	Kelengkapan sarana dan prasarana yang represantif guna menyimpan dan memelihara dokumentasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Sarana dan prasarana yang ada dianggap dapat melaksanakan kegiatan dokumentasi di lingkup pemerintah daerah	Efektif	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur dalam mendokumentasikan kegiatan pimpinan	Kepala Bagian Humas & Protokoler	12 bulan
9	Menyediakan media informasi melalui publikasi dan promosi daerah pada media cetak, eletronik dan siber guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap imformasi pembangunan, sesuai moto “ Kerjaku Membangun Pesisir Selatan” sekaligus sebagai “Rapor” Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Jika SKPD tidak menyelenggarakan publikasi dan promosi daerah maka publik tidak akan dapat mengetahui perkembangan kegiatan daerah selama tahun berjalan dan mengakibatkan terjadinya berbagai macam persepsi di masyarakat	Penyebarluasan informasi oleh Bagian Humas dengan memproduksi berita sendiri melalui media yang ada (media sosial, dan smartcity)	Informasi yang disampaikan kepada publik melalui media cetak, media elektronik dan media siber yang dimiliki oleh pihak ketiga	Efektif	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah melalui portal berita di media siber milik daerah	Kepala Bagian Humas & Protokoler	12 bulan
10	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan baik.	Pengelolaan dokumen pengadaan barang dan jasa tidak tertata dengan baik dan rapi.	Mengumpulkan dan inventarisasi seluruh dokumen / bahan pelelangan yang telah selesai dilakukan oleh Pokja ULP.	Sekretariat ULP meminta bahan - bahan pelelangan kepada Pokja ULP setelah selesai melalukan pelelangan	Efektif	Melakukan Pengendalian Dokumen melalui E- ULP dimana seluruh bahan lelang yang masuk harus terdaftar dalam aplikasi E- ULP ini.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan
11	Terlaksananya proses pengadaan barang / jasa secara elektronik	Kurangnya jumlah SDM yang mengerti tentang prosedur penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur LPSE	Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan SDM yang berkompeten untuk pelaksanaan LPSE secara online	Telah dilakukannya pelatihan di LKPP serta memaksimalkan penugasan terhadap personil LPSE yang ada, agar pelayanan tetap berjalan lancar.	Efektif	Perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan SDM secara berkelanjutan kepada pengelola LPSE	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	12 bulan
12	Terfasilitasinya pelaksanaan lelang dan klarifikasi pengadaan barang dan jasa	Terlambatnya pelaksanaan lelang kegiatan	Membuat Perbup yang mengatur tentang proses perencanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa sudah harus selesai pada awal tahun anggaran.	Penerbitan SK PA/KPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sudah bisa dilaksanakan pada bulan januari tahun berjalan.	belum efektif	Pelaksanaan kegiatan secara e-planning, e-budgeting dan e-Monev harus segera dilakukan.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan
13	Terlaksananya Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kurangnya Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Melakukan Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa secara rutin	Melaksanakan Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Efektif	Pelatihan Peningkatan SDM dalam Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12 bulan

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instanssi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Masih Rendahnya peningkatan kinerja pemerintah daerah	Melakukan rapat-rapat evaluasi penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Telah dilakukan evaluasi penilaian kinerja Pemerintah daerah per semester	Efektif	Penyediaan Aplikasi E-SAKIP secara Online	Kepala Bagian Organisasi	12 bulan
15	Tersedianya Laporan penilaian kinerja SKPD	Masih Rendahnya peningkatan kinerja SKPD	Penyusunan laporan hasil kinerja SKPD secara rutin	Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja OPD	Efektif	Penyusunan laporan hasil kinerja SKPD secara rutin	Kepala Bagian Organisasi	12 bulan
16	Tersusunnya dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat daerah	Tidak adanya peningkatan kinerja pejabat Struktural pada OPD	Penyusunan laporan hasil kinerja Pejabat Strutural OPD	Melakukan monitoring dan evaluasi pejabat struktural OPD	Efektif	Penyusunan laporan hasil kinerja pejabat Struktural OPD secara rutin	Kepala Bagian Organisasi	12 bulan
17	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat Kedinasan	Jika surat tidak didistribusikan maka capaian kinerja tidak tercapai	Mendistribusikan surat ke Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dan seluruh OPD	Mendistribusikan surat ke Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dan seluruh OPD	Efektif	Terdistribusinya surat ke Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan seluruh OPD secara cepat dan tepat waktu dengan menggunakan aplikasi Online	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
18	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jika tagihan telepon, air dan listrik tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Mengevaluasi kebutuhan tagihan telepon, air dan listrik setiap bulannya	Membayar tagihan telepon, air dan listrik setiap bulannya	Efektif	Tagihan telepon, air dan listrik dibayarkan ke rekening perusahaan langsung	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
19	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jika Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	melakukan pendataan kondisiis peralatan dan perlengkapan kantor	Memelihara Peralatan dan Perlengkapan kantor secara rutin	Efektif	Menyusun Laporan kondisi peralatan dan perlengkapan kantor	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
20	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jika penyediaan Alat Tulis Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan pendataan secara rutin alat tulis kantor	Mengontrol dan memeriksa alat tulis kantor	Efektif	Menyusun Laporan kondisi alat tulis kantor	Kepala Bagian Keuangan	12 Bulan
21	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jika penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Mengevaluasi kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan setiap bulannya	mengontrol dan memeriksa barang cetakan dan penggandaan	Efektif	Menyusun laporan barang cetakan dan barang penggandaan	Kepala Bagian Keuangan	12 Bulan
22	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Energi Bersubsidi	Harga energi bersubsidi tidak sesuai dengan harga enceran tertinggi (HET)	Penyusunan Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan harga energi bersubsidi	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan harga energi bersubsidi	Efektif	Rapat Koordinasi secara rutin dengan para agen dan sub agen energi bersubsidi	Kepala Bagian Perekonomian	12 Bulan
23	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jika Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak terpenuhi maka Kesehatan tidak tercapai	Melaksanakan Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Efektif	Penetapan Tim yang bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
24	Meningkatnya Kualitas Penguatan Kelembagaan	Jika Penataan dan Penguatan Kelembagaan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Peraturan tentang Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Efektif	Melakukan evaluasi terhadap Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Kepala Bagian Organisasi	12 Bulan
25	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Jika perbaikan peralatan kerja tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Memeriksa secara rutin peralatan kerja yang akan diperbaiki	Mengontrol / memeriksa peralatan kerja yang akan diperbaiki	Efektif	Menyusun laporan kondisi peralatan kerja secara rutin	Kepala Bagian Umum	12 Bulan

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Jika Kebersihan Kantor tidak terpelihara maka keindahan tidak tercipta	Memelihara kebersihan dan kerapian lingkungan kantor secara rutin	Memelihara kebersihan dan kerapian lingkungan kantor secara rutin	Efektif	Menambah jumlah tenaga kebersihan kantor	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
27	Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD Setda yang baik	Penatausahaan Keuangan tidak sesuai dengan Peraturan	Rapat-rapat koordinasi dan evaluasi secara rutin tentang penatausahaan keuangan	Rapat-Rapat evaluasi secara rutin setiap bulan	Efektif	Menyusun SOP tentang penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kepala Bagian keuangan	12 Bulan
28	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jika penyediaan alat listrik dan elektronik tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan pemeriksaan alat listrik dan elektronik secara rutin	Memeriksa alat listrik dan elektronik yang rusak	Efektif	Menyusun laporan kebutuhan alat listrik dan elektronik secara tepat	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
29	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jika Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan pendataan kondisi peralatan dan peralatan kantor	Pendataan jumlah peratan dan perlengkapan kantor	Efektif	Menyusun laporan kondisi peralatan dan perlengkapan kantor secara berkala	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
30	Tersedianya makanan dan minuman	Jika Penyediaan Makanan dan Minuman tidak terpenuhi maka kebutuhan makan Tamu , Kepala daerah dan rapat akan terganggu dan capaian kinerja tidak tercapai	Menyediakan makan dan minum rapat, tamu dan kepala daerah	Menyediakan makan dan minum rapat, tamu dan kepala daerah	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan makan dan minuman rapat, tamu dan kepala daerah	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
31	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jika rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Menyusun laporan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
32	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Dalam	Jika rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Menyusun laporan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
33	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Sekretariat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tidak terlaksana secara maksimal	Evaluasi terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara berkala	Efektif	Penningkatan kemampuan dan kompetensi pegawai perencanaan dan pelaporan	Kepala Bagian Keuangan	12 Bulan
34	Tersedianya jasa tenaga kerja Non PNS	Jika penyediaan jasa tenaga kerja Non PNS tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Evaluasi kebutuhan Tenaga kerja Non PNS	Menyusun laporan pelaksanaan tugas tenaga kerja non pegawai	Efektif	Evaluasi kebutuhan Tenaga kerja Non PNS	Kepala Bagian Keuangan	12 Bulan
35	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan	Jika penyediaan perlengkapan Rumah Jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan evaluasi kebutuhan perlengkapan kantor	Melakukan pendataan kondisi perlengkapan rumah jabatan	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan perlengkapan rumah jabatan	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
36	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Jika peralatan gedung Kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan evaluasi kebutuhan peralatan gedung kantor	Melakukan pendataan kebutuhan peralatan gedung kantor	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan peralatan gedung kantor	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
37	Terpeliharanya Rumah Jabatan	Jika Pemeliharaan Rumah Jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan rumah jabatan	Melakukan pendataan kebutuhan pemeliharaan rumah jabatan	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan rumah jabatan	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
38	Terpeliharanya Rumah Dinas	Jika pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan rumah dinas	Melakukan pendataan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan rumah dinas	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
39	Terpeliharanya Gedung Kantor	Jika pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor	Melakukan pendataan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor	Kepala Bagian Umum	12 Bulan

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Jika pemeliharaan Mobil Jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan mobil jabatan	Melakukan pendataan kebutuhan pemeliharaan mobil jabatan	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan mobil jabatan	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
41	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Jika pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Melakukan pendataan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
42	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan	Jika pemeliharaan Rumah jabatan tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan Rumah jabatan	Melakukan pendataan kebutuhan pemeliharaan Rumah Jabatan	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan Rumah jabatan	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
43	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan rumah dinas (KDH)	Jika penyediaan alat listrik dan elektronik tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Melakukan evaluasi kebutuhan Alat listrik dan elektronik	Melakukan pendataan kebutuhan Alat listrik dan elektronik	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan Alat listrik dan elektronik	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
44	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (KDH)	Jika rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Menyusun laporan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
45	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (KDH)	Jika pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (KDH) tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Menyusun laporan kebutuhan Pakaian dinas (KDH)	Melakukan evaluasi kebutuhan Pakaian Dinas (KDH)	Efektif	Melakukan evaluasi kebutuhan Pakaian Dinas (KDH)	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
46	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip lingkup Sekretariat Daerah	Sulit dalam pencarian dokumen / arsip	Penyediaan aplikasi/sistem informasi kearsipan	Pendataan dan pencatatan dokumen arsip	Efektif	Penyediaan aplikasi/sistem informasi kearsipan	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
47	Tersedianya Dokumen Aset/Barang Sekretariat Daerah	Aset Sekretariat Daerah Tidak dikelola dengan baik	Penacatatan aset tetap dan barang habis pakai dengan Aplikasi Barang Habis Pakai	Pencatatan pada buku inventaris barang dan barang habis pakai	Efektif	Pengawasan terhadap pencatatan belanja modal dan barang habis pakai	Kepala Bagian Umum	12 Bulan
48	Tersusunnya Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan	Terlambatnya penyusunan Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan	Melakukan survey secara berkala terhadap harga satuan pokok kegiatan	Membentuk Tim Penyusun Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan	Efektif	Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan dapat di publikasikan secara online	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	12 bulan
49	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan pembangunan daerah	Terlambatnya pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran	Pembentukan tim evaluasi penyusunan dokumen laporan pelaksanaan pembangunan	Rapat evaluasi penyusunan dokumen laporan pelaksanaan pembangunan daerah	Efektif	Pembentukan tim evaluasi penyusunan dokumen laporan pelaksanaan pembangunan	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	12 bulan
50	Tersusunnya dokumen prosedur kegiatan	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan	Pembentukan tim evaluasi penyusunan dokumen prosedur kegiatan	Rapat evaluasi penyusunan dokumen prosedur kegiatan secara berkala	Efektif	Pembentukan tim evaluasi penyusunan dokumen prosedur kegiatan	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	12 bulan
51	Tersedianya laporan DUK, Bezzeting, Kenaikan Pangkat, Berkala dll	Tertundanya kenaikan pangkat berkala dan tidak tertatanya administrasi kepegawaian	Pendataan dan evaluasi administrasi kepegawaian secara rutin dan berkala	Penyusunan laporan bulanan terkait administarasi kepegawaian	Efektif	Pendataan administrasi kepegawaian dengan aplikasi Online	Kepala Bagian Organisasi	12 bulan

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Terlaksananya tugas-tugas Keprotokolan yang akan dihadiri oleh Pimpinan Pemerintah Daerah	Jika SKPD belum menyiapkan kebijakan dan pelayanan keprotokoleran daerah maka semua kegiatan yang berkaitan keprotokoleran daerah akan menjadi terganggu dan berdampak kepada citra daerah dalam hal yang bersifat protokoler	Perlu pelatihan dan peningkatan kompetensi apratur bidang keprotokolan	Pelaksanaan kegiatan keprotokoleran telah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada	Efektif	Penyusunan laporan pelaksanaan keprotokolan secara rutin	Kepala Bagian Humas & Protokoler	12 bulan
53	Terlaksananya fungsi koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan	Tidak singkronnya pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang ekonomi	Rapat koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan secara intensif dan rutin	Efektif	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang ekonomi	Asisten II	12 bulan
54	Terlaksananya pengendalian program/kegiatan pembangunan daerah	Kurangnya pengetahuan ASN tentang kegiatan pembangunan daerah	Menyusun laporan evaluasi hasil pengendalian program/kegiatan secara rutin	Penyusunan dokumen pengendalian program/kegiatan secara tepat waktu	Efektif	Menyusun laporan evaluasi hasil pengendalian program/kegiatan secara rutin	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	12 bulan
55	Terlaksananya Fungsi Staf Ahli Bupati secara Optimal	Belum optimalnya fungsi Staf Ahli Bupati	Penyusunan laporan rekomendasi staf ahli bupati secara berkala	Penyusunan laporan rekomendasi staf ahli bupati	Efektif	Penyusunan laporan rekomendasi staf ahli bupati secara berkala	Staf ahli	12 bulan
56	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Umum, Organisasi, dan Keuangan	Tidak singkronnya pelaksanaan kegiatan bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang umum, organisasi dan keuangan	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang umum, organisasi dan keuangan	Efektif	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang umum, organisasi dan keuangan	Asisten II	12 bulan
57	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum	Tidak singkronnya pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang Pemerintahan, politik dan hukum	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang pemerintahan, politik dan hukum	Efektif	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang Pemerintahan, politik dan hukum	Asisten II	12 bulan
58	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara / Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Jika Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri tidak terpenuhi maka capaian kinerja tidak tercapai	Penyusunan laporan evaluasi penerimaan kunjungan kerja pejabat negara secara rutin	Menyiapkan kebutuhan kunjungan tamu negara	Efektif	Penyusunan laporan evaluasi penerimaan kunjungan kerja pejabat negara secara rutin	Bagian keuangan	12 bulan
59	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Kurangnya optimalnya penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Penyusunan laporan hasil evaluasi rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten secara rutin	Pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten secara rutin	Efektif	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kabupaten secara rutin	Bagian Pemerintahan dan OTDA	12 bulan
60	Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan tugas tugas pemerintahan di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah tidak terlaksana secara optimal	Penyusunan laporan evaluasi hasil fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara rutin	Penyusunan laporan evaluasi hasil fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara rutin	Efektif	Penyusunan laporan evaluasi hasil fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara rutin	Bagian Pemerintahan dan OTDA	12 bulan

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan kewilayahan	Pelaksanaan Pembinaan belum terlaksana secara optimal	Penyusunan laporan hasil koordinasi dan pembinaan kewilayahan secara rutin	Pelaksanaan pembinaan kewilayahan secara rutin	Efektif	Penyusunan laporan hasil koordinasi dan pembinaan kewilayahan secara rutin	Bagian Pemerintahan dan OTDA	12 bulan
62	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Perintah Daerah (LPPD) terlaksana cukup baik, namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan dari unsur pendukung lampiran yang harus disajikan dalam laporan LPPD	Pembentukan tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh OPD	Penetapan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran organisasi	Efektif	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Aplikasi Online	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12 bulan
63	Terfasilitasnya kerjasama antar daerah	Pelaksanaan kerjasama belum berjalan secara optimal dan terencana	Tersedianya aplikasi sistem informasi data yang akurat dan tersistem, adanya dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat.	Penetapan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran organisasi	Efektif	Penyusunan laporan evaluasi hasil kerjasama antar daerah	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12 bulan
64	Terlaksananya Penilaian Kompetensi Camat	Tertundanya pelaksanaan kompetensi camat se Kabupaten Pesisir Selatan	Pembinaan secara berkala terhadap camat dan aparatur kecamatan	Penetapan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan	Efektif	Pelaksanaan sosialisasi dan diklat kepada camat secara berkala	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12 Bulan
65	Tersusunnya dokumen penamaan rupa bumi dan unsur alami	Terlambatnya penyusunan dokumen penamaan rupa bumi dan unsur alami	Penyusunan dokumen rupa bumi dan unsur alami dengan melibatkan seluruh pihak terkait secara intensif	Rapat koordinasi penyusunan dokumen rupa bumi dan unsur alami	Efektif	Penyediaan Aplikasi Penamaan rupa bumi dan unsur alami secara online	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12 Bulan
66	Terfasilitasnya penegasan batas daerah dan kecamatan	Terlambatnya penyusunan dokumen batas daerah dan kecamatan	Penyusunan dokumen batas daerah dan kecamatani dengan melibatkan seluruh pihak terkait secara intensif	Rapat koordinasi penyusunan dokumen batas daerah dan kecamatan	Efektif	Penyusunan dokumen batas daerah dan kecamatani dengan melibatkan seluruh pihak terkait secara intensif	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12 Bulan
67	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Terlambatnya penyusunan dokumen LKPJ	Pembentukan tim penyusun laporan Keterangan Pertanggungjaban (LKPJ) dengan melibatkan seluruh OPD	Penetapan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran organisasi	Efektif	Penyusunan LKPJ dengan menggunakan Aplikasi Online	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12 bulan
68	Terbentuknya Nagari binaan Perantau	Tidak terbentuknya nagari binaan perantau	Pembinaan secara intensif terhadap nagari binaan perantau	Menyusun dokumen kerjasama dengan para perantau untuk melakukan pembentukan dan pembinaan Nagari Binaan Perantau	Efektif	Pembinaan secara intensif terhadap nagari binaan perantau	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	12 bulan

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan pestisida	Harga pupuk dan pestisida bersubsidi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)	Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi harga pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai HET	Melakukan Monitoring dan evaluasi harga pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai HET	Efektif	Rapat koordinasi secara rutin dengan para agen dan sub Agen pupuk bersubsidi dan pestisida	Kepala bagian Perekonomian	12 bulan
70	Terlaksananya koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	Koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan tidak terlaksana secara optimal	Penyusunan laporan hasil rapat koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	Monitoring dan evaluasi peningkatan ekonomi pesisir selatan	Efektif	Penyusunan laporan hasil rapat koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	Kepala bagian Perekonomian	3 bulan
71	Terlaksananya Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Tidak terlaksananya Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Penyusunan laporan Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Rapat Koordinasi Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Efektif	Penyusunan laporan Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Kepala bagian Perekonomian	12 bulan
72	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Tidak terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM	Terlaksananya Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Efektif	Terlaksananya Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM	Kepala bagian Perekonomian	12 bulan
73	Terlaksananya Safari Ramadhan oleh Tim Silaturahmi Pemda	Minimnya informasi pembangunan dan penjelasan tentang isu krusial yang berkembang di tengah masyarakat	Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan Safari Ramadhan oleh Tim Silaturahmi Pemda	Pelibatan seluruh OPD dalam pelaksanaan Safari Ramadhan	Efektif	Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan Safari Ramadhan oleh Tim Silaturahmi Pemda	Kepala Bagian Kesra	12 bulan
74	Terlaksnanya MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	Kurangnya pembinaan utusan MTQ Kabupaten terpilih untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi	Pembinaan terhadap kafilah MTQ kabupaten Pesisir Selatan	Rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh instansi terkait	Efektif	Pembinaan terhadap kafilah MTQ kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Bagian Kesra	12 bulan
75	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Keberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji	Terlambatnya pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan	Penyusunan hasil Evaluasi persiapan dan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	Rapat Persiapan pelaksanaan dan pemberangkatan dan pemulagan Jemaah Haji	Efektif	Penyusunan hasil Evaluasi persiapan dan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	Kepala Bagian Kesra	12 bulan
76	Terbinanya lembaga didikan subuh	Kurangnya pembinaan Lembaga Didikan Subuh Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dinilai Provinsi	Pendataan dan pembinaan Lembaga didikan subuh	Monitoring dan evaluasi pembinaan lembaga didikan subuh	Efektif	Pendataan dan pembinaan Lembaga didikan subuh	Kepala Bagian Kesra	12 bulan
77	Terlaksananya koordinasi dan kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Tidak terlaksananya koordinasi kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Penyusunan Laporan hasil evaluasi Koordinasi kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Rapat koordinasi kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan dengan melibatkan instansi terkait	Efektif	Penyusunan Laporan hasil evaluasi Koordinasi kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Kepala Bagian Kesra	12 bulan
78	Terkelolanya Pemberian Hibah Bansos	Keterlambatan pendistribusian hibah bansos	Menyusun laporan hasil verifikasi proposal hibah bansos	Melakukan verifikasi prosposal hibah bansos	Efektif	Menyusun laporan hasil verifikasi proposal hibah bansos	Kepala Bagian Kesra	12 bulan
79	Terbinanya Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Pelaksanaan pembinaan pondok pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran kurang optimal	Penyusunan laporan hasil pembinaan pondok pesantren, MDTA dan pondok Alquran	Pembinaan pondok pesantren, MDTA dan Pondok Alquran	Efektif	Pelaksanaan pembinaan pondok pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran kurang optimal	Kepala Bagian Kesra	12 bulan
80	Terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kurang terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penyusunan laporan Peningkatan Imtaq bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam	Peningkatan Imtaq bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam	Efektif	Penyusunan laporan Peningkatan Imtaq bagi Pegawai di Lingkugan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam	Kepala Bagian Kesra	12 bulan

No	Tujuan yang didentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Terlaksananya monitoring Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Kurang terbinanya UKS Kabupaten untuk penilaian tingkat propinsi	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan UKS untuk penilaian tingkat provinsi	Pembinaan UKS secara berkala	Efektif	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan UKS untuk penilaian tingkat provinsi	Kepala Bagian Kesra	12 bulan
82	Menurunnya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika	Rendahnya kesadaran tentang bahaya Narkotika	Penyusunan laporan hasil Sosialisasi Bahaya Narkotika kapada Siswa	Sosialisasi bahaya narkotika kepada Siswa	Efektif	Penyusunan laporan hasil Sosialisasi Bahaya Narkotika kapada Siswa	Kepala Bagian Kesbangpol	12 bulan
83	Terlaksananya operasionalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial	Tidak optimalnya penanganan konflik sosial	Penyusunan laporan hasil evaluasi penanganan konflik sosial	Penerbitan rekomendasi hasil penanganan konflik sosial	Efektif	Penyusunan laporan hasil evaluasi penanganan konflik sosial	Kepala Bagian Kesbangpol	12 bulan
84	Terlaksananya operasionalisasi Tim Intelijen Daerah	Kurangnya informasi terkait gangguan stabilitas keamanan daerah	Penyusunan laporan hasil evaluasi gangguan stabilitas keamanan daerah	Monitoring dan evaluasi gangguan stabilitas keamanan daerah	Efektif	Penyusunan laporan hasil evaluasi gangguan stabilitas keamanan daerah	Kepala Bagian Kesbangpol	12 bulan
85	Terlaksananya Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Saber Pungli	Meningkatnya Pungutan liar	Penyusunan laporan hasil evaluasi gangguan stabilitas keamanan daerah	Pelaksanaan operasi Saber pungli	Efektif	Penyusunan laporan hasil evaluasi gangguan stabilitas keamanan daerah	Kepala Bagian Kesbangpol	12 bulan
86	Meningkatnya kesadaran bela negara bagi siswa	Kurangnya kesadaran bela negara bagi siswa	Penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara	Pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara	Efektif	Penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kesadaran bela negara	Kepala Bagian Kesbangpol	12 bulan
87	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Meningkatnya gangguan ketertiban umum di dalam masyarakat	Penetapan Tim Forum Kepwaspadaan Dini Masyarakat	Rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Efektif	Penetapan Tim Forum Kepwaspadaan Dini Masyarakat	Kepala Bagian Kesbangpol	12 bulan
88	Terlaksananya kegiatan olahraga bagi aparatur	Rendahnya minat ASN untuk mengikuti kegiatan olahraga	Penyusunan Laporan Kegiatan pelaksanaan Olahraga bagi aparatur	Pelaksanaan Olahraga bagi Aparatur	Efektif	Penyusunan Laporan Kegiatan pelaksanaan Olahraga bagi aparatur	Kepala Bagian Kesra	12 bulan
89	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Kurang terlaksananya Koordinasi antar Pimpinan Daerah	Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Efektif	Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Kepala Bagian Kesbangpol	12 bulan
90	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kurang maksimalnya Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Efektif	Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kepala Bagian Kesbangpol	12 bulan

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terukurnya IKM dengan nilai yang lebih baik	Melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan IKM	Laporan Penilaian IKM	Bagian Organisasi	OPD	12 bulan
2	Meningkatnya pelayanan publik	Penyusunan laporan hasil evaluasi peningkatan manajemen pelayanan publik	Laporan Hasil Evaluasi	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	12 bulan
3	Tersedianya produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah/Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Melakukan Pembinaan Penyusunan Ranperda / Perda terhadap OPD	Dokumen Peraturan Daerah	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	12 bulan
4	Membantu menvalidasi, evaluasi dan klarifikasi produk hukum terutama peraturan nagari dan keputusan bupati yang dilahirkan oleh OPD dan Nagari	Melakukan pembinaan penyusunan Peraturan nagari terhadap wali nagari dan melakukan pembinaan membuat keputusan bupati terhadap OPD	Peraturan Nagari dan Keputusan Bupati	Bagian Hukum	OPD	12 bulan
5	Untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan perkara, baik yang terkait dengan aset Pemerintah Daerah dan lain-lain	Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan HAM	Laporan RANHAM	Bagian Hukum	OPD	12 bulan
6	Terlaksananya Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah Tahun 2018	Melakukan Penataan dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Dokumen Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	OPD	12 bulan
7	Menjalin koordinasi dan guna mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Perusahaan Pers dan Wartawan	Penetapan Standar Operasional Prosedur tentang tata cara kerja sama dengan media massa	Dokumen SOP Kerjasama dengan Media Massa	Bagian Humas & Protokoler	OPD	12 bulan
8	Mendokumentasikan acara kegiatan pimpinan pemerintah daerah, sesuai moto “Kerjaku Membangun Pesisir Selatan” sekaligus sebagai “Rapor” Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur dalam mendokumentasikan kegiatan pimpinan	Laporan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Humas & Protokoler	OPD	12 bulan

9	Menyediakan media informasi melalui publikasi dan promosi daerah pada media cetak, elektronik dan siber guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi pembangunan, sesuai moto " Kerjaku Membangun Pesisir Selatan" sekaligus sebagai "Rapor" Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah melalui portal berita di media siber milik daerah	Laporan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Humas & Protokoler	OPD	12 bulan
10	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan baik.	Melakukan Pengendalian Dokumen melalui E- ULP dimana seluruh bahan lelang yang masuk harus terdaftar dalam aplikasi E- ULP ini.	Aplikasi Sistem Informasi E-ULP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	OPD	12 bulan
11	Terlaksananya proses pengadaan barang / jasa secara elektronik	Perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan SDM secara berkelanjutan kepada pengelola LPSE	Aplikasi Sistem Informasi LPSE	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	OPD	12 bulan
12	Terfasilitasinya pelaksanaan lelang dan klarifikasi pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan kegiatan secara e-planning, e-budgeting dan e-Monev harus segera dilakukan.	Aplikasi Sistem Informasi e-Planning, e-Budgeting dan E-Monev	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	OPD	12 bulan
13	Terlaksananya Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelatihan peningkatan SDM dalam Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa untuk meningkatkan kapasitas Aparatur	Sosialisasi dan bimbingan teknis	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	OPD	12 bulan
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instanssi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Penyediaan Aplikasi E-SAKIP secara Online	Aplikasi Sistem Informasi E-SAKIP	Bagian Organisasi	OPD	12 bulan
15	Tersedianya Laporan penilaian kinerja SKPD	Penyusunan laporan hasil kinerja SKPD secara rutin	Laporan kinerja OPD	Bagian Organisasi	OPD	12 bulan
16	Tersusunnya dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat daerah	Penyusunan laporan hasil kinerja pejabat Struktural OPD secara rutin	Laporan hasil kinerja Pejabat Struktural OPD	Bagian Organisasi	OPD	12 bulan
17	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat Kedinasan	Terdistribusinya surat ke Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan seluruh OPD secara cepat dan tepat waktu dengan menggunakan aplikasi Online	Aplikasi Sistem Informasi E-Surat-Menyurat	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
18	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan telepon, air dan listrik dibayarkan ke rekening perusahaan langsung	Laporan Tagihan Telepon, Air dan listrik	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
19	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyusun Laporan kondisi peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan Kondisi peralatan dan perlengkapan kerja	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
20	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Menyusun Laporan kondisi alat tulis kantor	Laporan kondisi alat tulis kantor	Bagian Keuangan	Sekretariat Daerah	12 Bulan

21	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Menyusun laporan barang cetakan dan barang penggandaan	Laporan Kondisi Barang cetakan dan barang pengadaan	Bagian Keuangan	Sekretariat Daerah	12 Bulan
22	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Energi Bersubsidi	Rapat Koordinasi secara rutin dengan para agen dan sub agen energi bersubsidi	Laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan energi bersubsidi	Bagian Perekonomian	Sekretariat Daerah	12 Bulan
23	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Penetapan Tim yang bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah	Laporan Kondisi kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
24	Meningkatnya Kualitas Penguatan Kelembagaan	Melakukan evaluasi terhadap Penguatan kelembagaan yang telah dibentuk	Dokumen Perbup	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	12 Bulan
25	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Menyusun laporan kondisi peralatan kerja secara rutin	Laporan kondisi peralatan kerja	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
26	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Menambah jumlah tenaga kebersihan kantor	Laporan	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
27	Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD Setda yang baik	Menyusun SOP tentang penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	SOP tentang penatausahaan keuangan	Bagian Keuangan	Sekretariat Daerah	12 Bulan
28	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyusun laporan kebutuhan alat listrik dan elektronik secara tepat	Laporan kebutuhan alat listrik dan elektronik	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
29	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Menyusun laporan kondisi peralatan dan perlengkapan kantor secara berkala	Laporan kondisi peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
30	Tersedianya makanan dan minuman	Melakukan evaluasi kebutuhan makan dan minuman rapat, tamu dan kepala daerah	Laporan evaluasi kebutuhan makan dan minum rapat, tamu dan kepala daerah	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
31	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
32	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Dalam	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
33	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Sekretariat Daerah	Peningkatan kemampuan dan kompetensi pegawai perencanaan dan pelaporan	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Bagian Keuangan	Sekretariat Daerah	12 Bulan
34	Tersedianya jasa tenaga kerja Non PNS	Evaluasi kebutuhan Tenaga kerja Non PNS	Laporan evaluasi kebutuhan tenaga kerja Non PNS	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
35	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan	Melakukan evaluasi kebutuhan perlengkapan rumah jabatan	Laporan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
36	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Melakukan evaluasi kebutuhan peralatan gedung kantor	Laporan kebutuhan peralatan gedung kantor	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan

37	Terpeliharanya Rumah Jabatan	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan rumah jabatan	Laporan kebutuhan pemeliharaan rumah jabatan	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
38	Terpeliharanya Rumah Dinas	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan rumah dinas	Laporan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
39	Terpeliharanya Gedung Kantor	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor	Laporan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
40	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan mobil jabatan	Laporan kebutuhan pemeliharaan mobil jabatan	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
41	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Laporan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
42	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan Rumah jabatan	Laporan evaluasi kebutuhan pemeliharaan rumah jabatan	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
43	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan rumah dinas (KDH)	Melakukan evaluasi kebutuhan Alat listrik dan elektronik	Laporan kebutuhan alat listrik dan elektronik	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
44	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (KDH)	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
45	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (KDH)	Melakukan evaluasi kebutuhan Pakaian Dinas (KDH)	Laporan kebutuhan pakaian dinas KDH	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
46	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip lingkup Sekretariat Daerah	Penyediaan aplikasi/sistem informasi kearsipan	Aplikasi/Sistem informasi kearsipan	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 Bulan
47	Tersedianya Dokumen Aset/Barang Sekretariat Daerah	Pengawasan terhadap pencatatan belanja modal dan barang habis pakai	Dokumen laporan Aset dan barang persediaan	Bagian Keuangan	Sekretariat Daerah	12 Bulan
48	Tersusunnya Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan	Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan dapat di publikasikan secara online	Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	OPD	12 bulan
49	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan pembangunan daerah	Pembentukan tim evaluasi penyusunan dokumen laporan pelaksanaan pembangunan	Laporan pelaksanaan pembangunan	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	OPD	12 bulan
50	Tersusunnya dokumen prosedur kegiatan	Pembentukan tim evaluasi penyusunan dokumen prosedur kegiatan	Dokumen Prosedur Kegiatan	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	OPD	12 bulan
51	Tersedianya laporan DUK, Bezzeting, Kenaikan Pangkat, Berkala dll	Pendataan administrasi kepegawaian dengan aplikasi Online	Aplikasi Sistem Sinformasi Kepegawaian	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	12 bulan
52	Terlaksananya tugas-tugas Keprotokolan yang akan dihadiri oleh Pimpinan Pemerintah Daerah	Penyusunan laporan pelaksanaan keprotokolan secara rutin	Laporan pelaksanaan keprotokolan	Bagian Humas & Protokoler	OPD	12 bulan
53	Terlaksananya fungsi koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang ekonomi	Laporan rapat koordinasi Bidang Ekonomi	Asisten 2	OPD	12 bulan

54	Terlaksananya pengendalian program/kegiatan pembangunan daerah	Menyusun laporan evaluasi hasil pengendalian program/kegiatan secara rutin	Laporan evaluasi pengendalian program dan kegiatan	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	OPD	12 bulan
55	Terlaksananya Fungsi Staf Ahli Bupati secara Optimal	Penyusunan laporan rekomendasi staf ahli bupati secara berkala	Laporan rekomendasi staf ahli bupati	Staf Ahli Bupati	OPD	12 bulan
56	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Umum, Organisasi, dan Keuangan	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang umum, organisasi dan keuangan	Laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang umum, organisasi dan keuangan	Asisten 3	OPD	12 bulan
57	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang Pemerintahan, politik dan hukum	Laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Asisten 1	OPD	12 bulan
58	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara / Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Penyusunan laporan evaluasi penerimaan kunjungan kerja pejabat negara secara rutin	Laporan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara	Bagian Umum	Sekretariat Daerah	12 bulan
59	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kabupaten secara rutin	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD	12 bulan
60	Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan laporan evaluasi hasil fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara rutin	Laporan hasil failitasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD	12 bulan
61	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan kewilayahan	Penyusunan laporan hasil koordinasi dan pembinaan kewilayahan secara rutin	Laporan koordinasi dan pembinaan kewilayahan	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD	12 bulan
62	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Aplikasi Online	Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bagian PBJ	OPD	12 bulan
63	Terfasilitasinya kerjasama antar daerah	Penyusunan laporan evaluasi hasil kerjasama antar daerah	Laporan Kerjasama Antar daerah	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD	12 bulan
64	Terlaksananya Penilaian Kompetensi Camat	Pelaksanaan sosialisasi dan diklat kepada camat secara berkala	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD	12 Bulan
65	Tersusunnya dokumen penamaan rupa bumi dan unsur alami	Penyediaan Aplikasi Penamaan rupa bumi dan unsur alami secara online	Dokumen laporan rupa bumi dan unsur Alami	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD	12 Bulan
66	Terfasilitasinya penegasan batas daerah dan kecamatan	Penyusunan dokumen batas daerah dan kecamatan dengan melibatkan seluruh pihak terkait secara intensif	Dokumen Laporan Batas daerah dan kecamatan	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD	12 Bulan
67	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Penyusunan LKPJ dengan menggunakan Aplikasi Online	Dokumen LKPJ	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD	12 bulan
68	Terbentuknya Nagari binaan Perantau	Pembinaan secara intensif terhadap nagari binaan perantau	Laporan pelaksanaan nagari binaan perantau	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD	12 bulan

69	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan pestisida	Rapat koordinasi secara rutin dengan para agen dan sub Agen pupuk bersubsidi dan pestisida	Laporan Pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	Bagian Perekonomian	OPD	12 bulan
70	Terlaksananya koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	Penyusunan laporan hasil rapat koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	Laporan peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	Bagian Perekonomian	OPD	3 bulan
71	Terlaksananya Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Penyusunan laporan Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Laporan Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Bagian Perekonomian	OPD	12 bulan
72	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM	Laporan Monev Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Bagian Perekonomian	OPD	12 bulan
73	Terlaksananya Safari Ramadhan oleh Tim Silaturahmi Pemda	Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan Safari Ramadhan oleh Tim Silaturahmi Pemda	Laporan pelaksanaan Safari Ramadhan	Bagian Kesra	OPD	12 bulan
74	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	Pembinaan terhadap kafilah MTQ kabupaten Pesisir Selatan	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Bagian Kesra	OPD	12 bulan
75	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Keberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji	Penyusunan hasil Evaluasi persiapan dan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	Laporan pelaksanaan fasilitasi Jemaah Haji	Bagian Kesra	OPD	12 bulan
76	Terbinanya lembaga didikan subuh	Pendataan dan pembinaan Lembaga didikan subuh	Laporan pembinaan Lembaga Didikan Subuh	Bagian Kesra	OPD	12 bulan
77	Terlaksananya koordinasi dan kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Penyusunan Laporan hasil evaluasi Koordinasi kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	laporan koordinasi kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Bagian Kesra	OPD	12 bulan
78	Terkelolanya Pemberian Hibah Bansos	Menyusun laporan hasil verifikasi proposal hibah bansos	laporan hasil verifikasi hibah bansos	Bagian Kesra	OPD	12 bulan
79	Terbinanya Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Pelaksanaan pembinaan pondok pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran kurang optimal	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Bagian Kesra	OPD	12 bulan
80	Terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kurang terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penyusunan laporan Peningkatan Imtaq bagi Pegawai di Lingkugan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam	Bagian Kesra	OPD	12 bulan
81	Terlaksananya monitoring Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan UKS untuk penilaian tingkat provinsi	laporan Pembinaan UKS	Bagian Kesra	OPD	12 bulan
82	Menurunnya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika	Penyusunan laporan hasil Sosialisasi Bahaya Narkotika kapada Siswa	Sosialisasi	Bagian Kesra	OPD	12 bulan

83	Terlaksananya pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Penyusunan laporan hasil evaluasi pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Laporan hasil evaluasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat	Bagian Kesbangpol	OPD	12 bulan
84	Terlaksananya operasionalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial	Penyusunan laporan hasil evaluasi penanganan konflik sosial	Laporan hasil evaluasi penanganan konflik sosial	Bagian Kesbangpol	OPD	12 bulan
85	Terlaksananya Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Saber Pungli	Penyusunan laporan hasil evaluasi gangguan stabilitas keamanan daerah	Laporan gangguan stabilitas keamanan daerah	Bagian Kesbangpol	OPD	12 bulan
86	Tersusunnya Laporan RANHAM	Penyusunan laporan hasil evaluasi pelanggaran HAM di Kabupaten Pesisir Selatan	Laporan pelanggaran HAM	Bagian Hukum	OPD	12 bulan
87	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Penetapan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Laporan Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Bagian Kesbangpol	OPD	12 bulan
88	Terlaksananya kegiatan olahraga bagi aparatur	Penyusunan Laporan Kegiatan pelaksanaan Olahraga bagi aparatur	Laporan pelaksanaan kegiatan Olahraga	Bagian Kesra	OPD	12 bulan
89	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Bagian Kesbangpol	OPD	12 bulan
90	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Bagian Kesbangpol	OPD	12 bulan

DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
				Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terukurnya IKM dengan nilai yang lebih baik	Melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan IKM	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
2	Meningkatnya pelayanan publik	Penyusunan laporan hasil evaluasi peningkatan manajemen pelayanan publik	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
3	Tersedianya produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah/Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Melakukan Pembinaan Penyusunan Ranperda / Perda terhadap OPD	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
4	Membantu memvalidasi, evaluasi dan klarifikasi produk hukum terutama peraturan nagari dan keputusan bupati yang dilahirkan oleh OPD dan Nagari	Melakukan pembinaan penyusunan Peraturan nagari terhadap wali nagari dan melakukan pembinaan membuat keputusan bupati terhadap OPD	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
5	Untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan perkara, baik yang terkait dengan aset Pemerintah Daerah dan lain-lain	Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan HAM	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
6	Terlaksananya Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah Tahun 2018	Melakukan Penataan dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
7	Menjalin koordinasi dan guna mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Perusahaan Pers dan Wartawan	Penetapan Standar Operasional Prosedur tentang tata cara kerja sama dengan media massas	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
8	Mendokumentasikan acara kegiatan pimpinan pemerintah daerah, sesuai moto “ Kerjaku Membangun Pesisir Selatan” sekaligus sebagai “Rapor” Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur dalam mendokumentasikan kegiatan pimpinan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	

9	Menyediakan media informasi melalui publikasi dan promosi daerah pada media cetak, eletronik dan siber guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi pembangunan, sesuai moto " Kerjaku Membangun Pesisir Selatan" sekaligus sebagai "Rapor" Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah melalui portal berita di media siber milik daerah	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
10	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan baik.	Melakukan Pengendalian Dokumen melalui E- ULP dimana seluruh bahan lelang yang masuk harus terdaftar dalam aplikasi E-ULP ini.	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
11	Terlaksananya proses pengadaan barang / jasa secara elektronik	Perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan SDM secara berkelanjutan kepada pengelola LPSE	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
12	Terfasilitasinya pelaksanaan lelang dan klarifikasi pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan kegiatan secara e-planning, e-budgeting dan e-Monev harus segera dilakukan.	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
13	Terlaksananya Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelatihan peningkatan SDM dalam Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa untuk meningkatkan kapasitas Aparatur	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instanssi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Penyediaan Aplikasi E-SAKIP secara Online	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
15	Tersedianya Laporan penilaian kinerja SKPD	Penyusunan laporan hasil kinerja SKPD secara rutin	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
16	Tersusunnya dokumen Evaluasi Jabatan Perangkat daerah	Penyusunan laporan hasil kinerja pejabat Struktural OPD secara rutin	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
17	Terlaksananya Penyediaan Surat Menyurat Kedinasan	Terdistribusinya surat ke Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan seluruh OPD secara cepat dan tepat waktu dengan menggunakan aplikasi Online	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
18	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan telepon, air dan listrik dibayarkan ke rekening perusahaan langsung	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
19	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyusun Laporan kondisi peralatan dan perlengkapan kantor	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
20	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Menyusun Laporan kondisi alat tulis kantor	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
21	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Menyusun laporan barang cetakan dan barang penggandaan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
22	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Energi Bersubsidi	Rapat Koordinasi secara rutin dengan para agen dan sub agen energi bersubsidi	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	

23	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Penetapan Tim yang beretanggung jawab dalam pelayanan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
24	Meningkatnya Kualitas Penguatan Kelembagaan	Melakukan evaluasi Penguatan Kelembagaan yang dibentuk	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
25	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Menyusun laporan kondisi peralatan kerja secara rutin	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
26	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Menambah jumlah tenaga kebersihan kantor	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
27	Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD Setda yang baik	Menyusun SOP tentang penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
28	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyusun laporan kebutuhan alat listrik dan elektronik secara tepat	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
29	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Menyusun laporan kondisi peralatan dan perlengkapan kantor secara berkala	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
30	Tersedianya makanan dan minuman	Melakukan evaluasi kebutuhan makan dan minuman rapat, tamu dan kepala daerah	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
31	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
32	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Dalam	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
33	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Sekretariat Daerah	Peningkatan kemampuan dan kompetensi pegawai perencanaan dan pelaporan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
34	Tersedianya jasa tenaga kerja Non PNS	Evaluasi kebutuhan Tenaga kerja Non PNS	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
35	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan	Melakukan evaluasi kebutuhan perlengkapan rumah jabatan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
36	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Melakukan evaluasi kebutuhan peralatan gedung kantor	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
37	Terpeliharanya Rumah Jabatan	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan rumah jabatan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
38	Terpeliharanya Rumah Dinas	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan rumah dinas	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
39	Terpeliharanya Gedung Kantor	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan gedung kantor	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	

40	Terpeliharanya Mobil Jabatan	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan mobil jabatan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
41	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
42	Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan	Melakukan evaluasi kebutuhan Pemeliharaan Rumah jabatan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
43	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan rumah dinas (KDH)	Melakukan evaluasi kebutuhan Alat listrik dan elektronik	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
44	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (KDH)	Melakukan evaluasi kebutuhan pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
45	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (KDH)	Melakukan evaluasi kebutuhan Pakaian Dinas (KDH)	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
46	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip lingkup Sekretariat Daerah	Penyediaan aplikasi/sistem informasi kearsipan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
47	Tersedianya Dokumen Aset/Barang Sekretariat Daerah	Pengawasan terhadap pencatatan belanja modal dan barang habis pakai	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
48	Tersusunnya Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan	Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan dapat di publikasikan secara online	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
49	Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan pembangunan daerah	Pembentukan tim evaluasi penyusunan dokumen laporan pelaksanaan pembangunan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
50	Tersusunnya dokumen prosedur kegiatan	Pembentukan tim evaluasi penyusunan dokumen prosedur kegiatan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
51	Tersedianya laporan DUK, Bezzeting, Kenaikan Pangkat, Berkala dll	Pendataan administrasi kepegawaian dengan aplikasi Online	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
52	Terlaksananya tugas-tugas Keprotokolan yang akan dihadiri oleh Pimpinan Pemerintah Daerah	Penyusunan laporan pelaksanaan keprotokolan secara rutin	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
53	Terlaksananya fungsi koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang ekonomi	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
54	Terlaksananya pengendalian program/kegiatan pembangunan daerah	Menyusun laporan evaluasi hasil pengendalian program/kegiatan secara rutin	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
55	Terlaksananya Fungsi Staf Ahli Bupati secara Optimal	Penyusunan laporan rekomendasi staf ahli bupati secara berkala	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
56	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Umum, Organisasi, dan Keuangan	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang umum, organisasi dan keuangan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	

57	Terlaksananya Fungsi koordinasi bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum	Penyusunan laporan evaluasi hasil rapat koordinasi bidang Pemerintahan, politik dan hukum	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
58	Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara / Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Penyusunan laporan evaluasi penerimaan kunjungan kerja pejabat negara secara rutin	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
59	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kabupaten secara rutin	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
60	Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan laporan evaluasi hasil fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara rutin	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
61	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan kewilayahan	Penyusunan laporan hasil koordinasi dan pembinaan kewilayahan secara rutin	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
62	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Aplikasi Online	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
63	Terfasilitasinya kerjasama antar daerah	Penyusunan laporan evaluasi hasil kerjasama antar daerah	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
64	Terlaksananya Penilaian Kompetensi Camat	Pelaksanaan sosialisasi dan diklat kepada camat secara berkala	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
65	Tersusunnya dokumen penamaan rupa bumi dan unsur alami	Penyediaan Aplikasi Penamaan rupa bumi dan unsur alami secara online	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
66	Terfasilitasinya penegasan batas daerah dan kecamatan	Penyusunan dokumen batas daerah dan kecamatan dengan melibatkan seluruh pihak terkait secara intensif	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
67	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Penyusunan LKPJ dengan menggunakan Aplikasi Online	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
68	Terbentuknya Nagari binaan Perantau	Pembinaan secara intensif terhadap nagari binaan perantau	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
69	Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan pestisida	Rapat koordinasi secara rutin dengan para agen dan sub Agen pupuk bersubsidi dan pestisida	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
70	Terlaksananya koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	Penyusunan laporan hasil rapat koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
71	Terlaksananya Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Penetapan tim forum pengendalian harga dan inflasi daerah	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
72	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Pembinaan BUMD, Koperasi, UMKM	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
73	Terlaksananya Safari Ramadhan oleh Tim Silaturahmi Pemda	Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan Safari Ramadhan oleh Tim Silaturahmi Pemda	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	

74	Terlaksnanya MTQ Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	Pembinaan terhadap kafilah MTQ kabupaten Pesisir Selatan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
75	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Keberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji	Penyusunan hasil Evaluasi persiapan dan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
76	Terbinanya lembaga didikan subuh	Pendataan dan pembinaan Lembaga didikan subuh	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
77	Terlaksananya koordinasi dan kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	Penyusunan Laporan hasil evaluasi Koordinasi kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
78	Terkelolanya Pemberian Hibah Bansos	Menyusun laporan hasil verifikasi proposal hibah bansos	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
79	Terbinanya Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran	Pelaksanaan pembinaan pondok pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran kurang optimal	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
80	Terbinanya Imtaq bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	kurang terbinanya imtaq bagi asn di lingkup Daerah Kabupaten pesisir selatan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
81	Terlaksananya monitoring Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan UKS untuk penilaian tingkat provinsi	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
82	Menurunnya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika	Penyusunan laporan hasil Sosialisasi Bahaya Narkotika kapada Siswa	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
83	Terlaksananya pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan	Penyusunan laporan hasil evaluasi pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
84	Terlaksananya operasionalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial	Penyusunan laporan hasil evaluasi penanganan konflik sosial	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
85	Terlaksananya Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Saber Pungli	Penyusunan laporan hasil evaluasi gangguan stabilitas keamanan daerah	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
86	Tersusunnya Laporan RANHAM	Penyusunan laporan hasil evaluasi pelanggaran HAM di Kabupaten Pesisir Selatan	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
87	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Penetapan Tim Forum Kepwaspadaan Dini Masyarakat	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
88	Terlaksananya kegiatan olahraga bagi aparatur	Penyusunan Laporan Kegiatan pelaksanaan Olahraga bagi aparatur	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
89	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	
90	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Penyusunan Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	belum efektif	pemantauan berkelanjutan	Atasan Langsung/Sekretaris Daerah	12 Bulan	